

Sinergitas

**PERCEPATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
KORBAN BENCANA MELALUI LUMBUNG SOSIAL
DI 4 PROVINSI DAERAH OTONOM BARU
DI TANAH PAPUA**



JOHN HERMAN MAMPIOPER

**SINERGITAS PERCEPATAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA
MELALUI LUMBUNG SOSIAL DI 4 PROVINSI
DAERAH OTONOM BARU DI TANAH PAPUA**

JOHN HERMAN MAMPIOPER

**CV. ANGKASA PELANGI
2024**

Sinergitas Percepatan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Melalui Lumbung Sosial Di 4 Provinsi
Daerah Otonom Baru Di Tanah Papua

Penulis :
John Herman Mampioper

ISBN :

Desain Sampul dan Tata Letak :
John Herman Mampioper

Penerbit :
CV. Angkasa Pelangi
Anggota IKAPI
Jl. Baru Youtefa - Abepura, Jayapura
Email : cv.angkasapelangipapua@gmail.com
Web : <https://angkasapelangipapua.com>

Cetakan Pertama, Mei 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan YME yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Proyek Perubahan yang berjudul ***Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua***. Tanpa nikmat dan karunia-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan Proyek Perubahan ini dengan baik.

Proyek Perubahan ini merupakan penyelesaian tugas penulis sebagai peserta pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023. Melalui pelaksanaan proyek perubahan ini penulis dapat menyelesaikan kewajiban tugas dalam pembelajaran latihan kepemimpinan, sekaligus berkesempatan melakukan inovasi melalui proyek perubahan ini serta membangun organisasi sebagai organisasi pembelajar

Proyek ini dimulai efektif selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada masa *off Campus* sejak 18 September sampai dengan 13 November 2023. Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan waktu, tenaga maupun biaya maka proyek perubahan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Menteri Sosial RI, Ibu Tri Rismaharini
2. Bapak Robben Rico Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI selaku *Mentor* pada proyek perubahan ini.
3. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si. selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
4. Bapak Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M.Eng, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua;
5. Bapak Agus Sumarsono, S.Sos, MMT selaku Coach;
6. Ibu Debora D.Salosa, S.Hut., MM selaku Penguji;

1. Seluruh Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua;
2. Bapak/Ibu yang tergabung dalam Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.
3. Para *stakeholder* dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta para *stake holder* dari unsur Pemerintah Daerah di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, Gereja, masyarakat serta para relawan yang telah berkolaborasi dalam melaksanakan proyek perubahan ini.
4. Para Panitia dan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX Lembaga Administrasi Negara – BPSDM Provinsi Papua Tahun 2023 yang telah membantu untuk berdiskusi dan memberikan saran masukan atas proyek perubahan ini.
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI beserta jajarannya.
6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Tertentu/Umum BBPPKS Jayapura Regional VI Kementerian Sosial RI.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam proyek perubahan ini.

Penulis tentu menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, tentunya penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak sebagai perbaikan tindak lanjut proyek perubahan untuk masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas seluruh kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jayapura, November 2023

John Herman Mampiooper

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gagasan Perubahan	6
C. Dasar Hukum	17
D. Tujuan Dan Manfaat Untuk Organisasi Adaptif	19
E. Output dan Outcome	22
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	23
A. Milestone Proyek Perubahan	23
B. Tata Kelola Proyek Perubahan	26
C. Identifikasi dan Analisis Stakeholders	29
D. Identifikasi Potensi Risiko Dan Rencana Solusi	34
E. Indikator Keberhasilan	35
F. Faktor Kunci Keberhasilan	36
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	37
A. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek dan Jangka Menengah	37
1. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek	37
2. Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Menengah	49
3. Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Panjang	68
B. Pengelolaan Stakeholder	72
C. Rencana dan Implementasi Strategi Marketing	74
D. Kendala Internal dan Eksternal	88
E. Upaya Mengatasi Kendala	89
F. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan	90

BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran dan Rekomendasi	93
C. Lesson Learned	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tren Kejadian Bencana Alam dan Dampaknya Tahun 2019-September 2023.....	2
Gambar 2.	Kerangka Regulasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Besar Kemensos di Regional I-VI dalam Mendukung Manajemen Bencana	7
Gambar 3.	Kerangka Pikir Proyek Perubahan	9
Gambar 4.	Rincian Bantuan Logistik Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Bencana	17
Gambar 5.	Skema Rancangan Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua.....	22
Gambar 6.	Matriks Analisa Stakeholder	32
Gambar 7.	Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan	39
Gambar 8.	Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura	40
Gambar 9.	Proses Pembahasan Skema Strategi dan Timeline Rencana Proyek Perubahan	41
Gambar 10.	Pembahasan Grand Desain Rancangan Proyek Perubahan	42
Gambar 11.	Pembahasan Kepdirjen Linjamsos tentang Lumbung Sosial dengan Stakeholders Internal maupun Eksternal	43
Gambar 12.	Pembahasan Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung Sosial	44
Gambar 13.	Data IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG sebagai Dasar Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana Nasional Tahun 2023	45
Gambar 14.	Peta Kejadian Bencana Alam di 4 Provinsi DOB Tahun 2023	46
Gambar 15.	Peta calon lokasi lumbung sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua tahun 2023	47

Gambar 16.	Koordinasi dan Konsultasi Kementerian Sosial dengan BMKG terkait Peta Calon Lokasi Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023	48
Gambar 17.	Peningkatan Kapasitas terhadap Relawan Sosial Perwakilan Lokasi Piloting Pembentukan Lumbung Sosial	53
Gambar 18.	Kegiatan FGD dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	58
Gambar 19.	Kegiatan Koordinasi dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya	58
Gambar 20.	Kegiatan Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah	59
Gambar 21.	Kegiatan Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan	60
Gambar 22.	Kegiatan Pertemuan Koordinasi Tim Efektif dengan Pihak GKI Papua dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan	61
Gambar 23.	Kegiatan Koordinasi Pihak Kemensos dengan Pemda Kab. Asmat dan Keuskupan Gereja Katholik Agats dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan	61
Gambar 24.	Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan	63
Gambar 25.	Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo ...	64
Gambar 26.	Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Agat Kabupaten Asmat, Papua Selatan ...	65

Gambar 27.	Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya	66
Gambar 28.	Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Monamany, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah	67
Gambar 29.	Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya	68
Gambar 30.	Draft Integrasi Data Lumbung Sosial kedalam e-SIMBA .	71
Gambar 31.	Analisa Stakeholder Lumbung Sosial	72
Gambar 32.	Lumbung Sosial di Distrik Agats Kab. Asmat Provinsi Papua Selatan	76
Gambar 33.	Dokumen Kepdirjen LIS	77
Gambar 34.	Dashboard e-SIMBA	78
Gambar 35.	Pengiriman Logistik ke Lumbung Sosial lebih murah secara cost dibanding pembelian/ pengiriman saat terjadi bencana	79
Gambar 37	Logistik lumbung sosial di Agats, Kab.Asmat, Provinsi Papua Selatan Provinsi DOB di Tanah Papua	80
Gambar 37	Logo Lumbung Sosial	81
Gambar 38.	Dukungan Anggota DPD RI terhadap Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Analisis SWOT dalam Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua	12
Tabel 2.	Timeline Rencana Proyek Perubahan Periode September s/d November 2023	23
Tabel 3.	Tim Efektif	26
Tabel 4.	Rencana Anggaran Proyek Perubahan	27
Tabel 5.	Stakeholders Internal dan Eksternal	29
Tabel 6.	Peran Stakeholder Internal	30
Tabel 7.	Peran Stakeholder Eksternal	31
Tabel 8.	Analisa Stakeholder Yang Telah Disesuaikan Dengan Rencana Implementasi Proyek Perubahan	33
Tabel 9.	Potensi Risiko dan Rencana Solusi	34
Tabel 10.	Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek periode September s/d November 2023	37
Tabel 11.	Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Menengah periode September s/d November 2023	49
Tabel 12.	Tabel Kategori dan Jenis Logistik pada Lumbung Sosial	62
Tabel 13.	Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Panjang periode September s/d November 2023	68
Tabel 14.	Mekanisme Perluasan dan Target Pembentukan Lumbung Sosial	70
Tabel 15.	Rencana Strategi Marketing	85
Tabel 16.	Ide Inovasi	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Tim Efektif	99
Lampiran 2.	Notula Rapat Pemilihan Lokasi & Strategi Distribusi Logistik LS	100
Lampiran 3.	Notula Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Literatur Kaitan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Grand Desain LS	101
Lampiran 4.	Hasil Pembahasan dan Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal tentang Lumbung Sosial	102
Lampiran 5.	Notula Pembahasan dan penyusunan standar operasional prosedur tentang Lumbung Sosial	103
Lampiran 6.	Pemetaan calon lokasi Lumbung Sosial mengacu pada Peta IRBI 2023	104
Lampiran 7.	Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Terhadap Relawan Sosial	105
Lampiran 8.	BAST Pengisian bantuan logistik Lumbung Sosial di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	106
Lampiran 9.	Pengenalan sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial berbasis digital	107
Lampiran 10.	Pengenalan Implementasi Data Laporan Manual ke dalam Sistem Manajemen Logistik yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center	108
Lampiran 11.	Dukungan Menteri Sosial RI terhadap Program Lumbung Sosial	109
Lampiran 12.	Dukungan Plt. Sekretaris Jenderal Kemensos RI terhadap Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua	110
Lampiran 13.	Dukungan Anggota DPD RI Dapil Papua, Dr. Filep Wamafma, SH, M.Hum terhadap Program Lumbung Sosial di Tanah Papua	111
Lampiran 14.	Dukungan KAPOLDA Papua, Irjen Pol. Matius Fakiri, S.I.K	112

Lampiran 15. Dukungan Rektor Universitas Cenderawasih	113
Lampiran 16. Dukungan Akademisi Universitas Papua, Prof. Charlie Heatubun	113
Lampiran 17. Dukungan Kepala Balai Besar MKG Wilayah V Papua	114
Lampiran 18. Dukungan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNIPA	114
Lampiran 19. Dukungan Pj. Gubernur Papua Barat Daya	115
Lampiran 20. Dukungan Uskup Keuskupan Gereja Katholik	115
Lampiran 21. Dukungan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat	116
Lampiran 22. Dukungan Dinas Sosial Kab. Asmat, Papua Selatan	116
Lampiran 23. Dukungan Komandan Korem 173/PVB Kodam XVII Cenderawasih	117
Lampiran 24. Dukungan Komandan Komando Distrik Militer 1705/ Nabire	117
Lampiran 25. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kab. Lanny Jaya	118
Lampiran 26. Dukungan Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan	118
Lampiran 27. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan	119
Lampiran 28. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	119
Lampiran 29. Dukungan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah ...	120
Lampiran 30. Dukungan Ketua Jemaat GKI Koinonia Moenamani Kab. Dogiyai	120
Lampiran 31. Dukungan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai	121
Lampiran 32. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya	121
Lampiran 33. Dukungan Pj. Bupati Maybrat	122
Lampiran 34. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya	122
Lampiran 33. Dukungan Pj. Bupati Dogiyai	123

Lampiran 17. Dukungan Akademisi Universitas Papua, Prof. Charlie Heatubun	50
Lampiran 18. Dukungan Kepala Balai Besar MKG Wilayah V Papua	50
Lampiran 19. Dukungan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNIPA	50
Lampiran 20. Dukungan Pj. Gubernur Papua Barat Daya	50
Lampiran 21. Dukungan Uskup Keuskupan Gereja Katolik	50
Lampiran 22. Dukungan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat	50
Lampiran 23. Dukungan Dinas Sosial Kabupaten Asmat, Papua Selatan	50
Lampiran 24. Dukungan Komandan KOREM 173/PVB Kodam XVII Cenderawasih	50
Lampiran 25. Dukungan Komandan Komando Distrik Militer 1705/Nabire	50
Lampiran 26. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kab. Lanny Jaya	50
Lampiran 27. Dukungan Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan	50
Lampiran 28. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan	50
Lampiran 29. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.....	50
Lampiran 30. Dukungan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah	50
Lampiran 31. Dukungan Ketua Jemaat GKI Koinonia Moenamani Kab. Dogiyai	50
Lampiran 32. Dukungan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai.....	50
Lampiran 33. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya	50
Lampiran 34. Dukungan Pj. Bupati Maybrat	50
Lampiran 35. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya	50
Lampiran 36. Dukungan Pj. Bupati Dogiyai	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The 2010 Asia-Pacific Disaster Report menyatakan bahwa masyarakat di kawasan Asia Pasifik 4 kali lebih rentan terkena dampak bencana alam dibanding masyarakat di wilayah Afrika dan 25 kali lebih rentan dari pada di Amerika Utara dan Eropa. Laporan PBB tersebut menjadikan Indonesia sebagai peringkat 4 negara paling rentan terkena dampak bencana alam di Asia Pasifik. Laporan yang sama juga mengestimasi bahwa lebih dari 18 juta jiwa terkena dampak bencana alam di Indonesia, dari tahun 1980 sampai 2009. The 2009 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction juga memberikan pemeringkatan yang fantastis untuk Indonesia pada level pengaruh bencana terhadap manusia, peringkat 3 dari 153 untuk gempa bumi, dan 1 dari 265 negara untuk tsunami (Kuntjoro, I. dan Jamil, S. 2010 dalam Sulubere, 2015). UN-ESCAP (2021) mencatat bahwa selama 50 tahun terakhir, bencana alam di Asia dan Pasifik telah mempengaruhi 6,9 miliar orang dan membunuh lebih dari 2 juta, hampir semuanya menjadi korban bencana terkait air, seperti banjir, kekeringan, dan badai.

Pada konteks agenda kebijakan internasional, kebencanaan merupakan penghalang terbesar dalam mencapai pengurangan kemiskinan sebagaimana termaktub dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Ratifikasi Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015 menjadi titik kulminasi kesadaran politik global untuk lebih menitikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan memastikan kesiapsiagaan masyarakat dengan menargetkan secara substansial pengurangan korban jiwa (ISDR, 2005). Selanjutnya sebagai instrumen pendorong keberlanjutan kerangka aksi internasional HFA maka disahkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030. Perubahan terpenting dari kerangka kerja SFDRR adalah transformasi fokus dalam penanganan bencana, dari manajemen bencana menjadi manajemen risiko bencana. Pengakuan masyarakat internasional terhadap konsep “disaster-prone countries with specific characteristic, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines” merupakan salah satu isu utama yang berhasil diperjuangkan

diperjuangkan Delegasi Indonesia. Isu lain yang juga menjadi prioritas adalah penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana (UNISDR, 2015).



Gambar1. **Tren Kejadian Bencana Alam dan Dampaknya Tahun 2019 s/d September 2023**

(Sumber: IRBI BNPB, 2022)

Sebagai salah satu negara dengan indeks risiko bencana alam tertinggi di dunia, Indonesia dihadapkan pada risiko bencana geologis maupun hidrometeorologis. Bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi disebabkan oleh pergerakan tiga lempeng tektonik teraktif dunia yang mengelilingi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh cincin api yang membentang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi juga mengancam penduduk Indonesia karena berbagai hal, baik sebab alam maupun ulah manusia yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Peta Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tingkat Provinsi Tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh provinsi di wilayah Indonesia memiliki indeks risiko multi bahaya tingkat tinggi dan sedang. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten/kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Tren kejadian bencana alam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada Gambar 1 menunjukkan kenaikan signifikan mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, kemudian menurun di tahun 2022 dan tahun 2023. Melihat perbandingan jumlah bencana, bencana pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu bencana berjumlah 3.544 kejadian, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2.897 atau turun 6 persen. Namun

menjadi perhatian, jumlah populasi yang meninggal dunia lebih tinggi di tahun 2022. BNPB (2022) melaporkan korban meninggal pada tahun 2022 sebanyak 858 jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 200 jiwa atau turun 7 persen. Penurunan tidak hanya pada jumlah korban jiwa tetapi juga korban luka-luka, warga terdampak dan mengungsi serta rumah rusak. Untuk itulah, pembelajaran dari rangkaian kejadian bencana diatas penting untuk dijadikan acuan bagi rencana kesiapsiagaan yang lebih baik di masa depan.

Jika ditinjau kembali, beberapa peristiwa bencana yang melanda Indonesia telah menyebabkan kerugian ekonomi negara lebih dari USD 44 juta dan berdampak pada lebih dari 250 juta orang (Djalante dan Garschagen, 2017). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, total kerugian akibat bencana mencapai Rp1,06 triliun pada 2022. Jumlah tersebut menurun 90,42% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,06 triliun. Kerugian tersebut akibat 3.522 bencana alam yang terjadi sepanjang tahun lalu. Mayoritas kerugian disebabkan oleh bencana geologi, salah satunya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Adapun, dalam satu dekade terakhir, jumlah kerugian akibat bencana paling besar terjadi pada 2018 yang mencapai Rp58,95 triliun. Hal itu paling banyak disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Ada pula kerugian akibat tsunami di Selat Sunda. Kemudian, bencana lain yang menyebabkan kerugian besar adalah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada 2018. Dampak dari berbagai bencana yang terjadi juga memunculkan potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran (Bappenas, 2018). Sebagai contoh pasca gempa di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 1,75 persen dari sebelumnya 6,24 persen, inflasi meningkat menjadi 6,63 persen dari sebelumnya 3,65 persen. Akibat bencana tersebut menambah jumlah penduduk miskin baru sebesar 18.400 jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah tahun 2019 meningkat menjadi 14,42 persen atau 438.610 jiwa (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2019).

Kajian Pusat Gempa Nasional (2017) menggambarkan bahwa letak Indonesia yang berada pada batas pertemuan tiga lempeng-lempeng tektonik besar dunia yang sangat aktif menyebabkan berisiko tinggi bencana gempa megathrust dan tsunami. Tim Pusat Studi Gempa Nasional menjelaskan bahwa pada bagian selatan Jawa tepatnya di Samudra Hindia terdapat 3 segmentasi zona megathrust. Segmen tersebut antara lain Segmen Jawa Timur, Segmen Jawa Tengah-Jawa Barat, dan Segmen Banten-Selatan Sunda. Gempa megathrust adalah gempa bumi yang

terjadi pada zona awal penunjam (subduksi) lempeng. Indonesia memiliki 16 segmentasi megathrust aktif dan berpotensi menghasilkan gempa dahsyat dengan magnitudo mencapai 8 hingga 9. Disebutkan bahwa ada potensi gempa besar dari segmen megathrust di balik potensi tsunami dari laut selatan Jawa. Temuan potensi tsunami tersebut dengan ketinggian maksimum 20,2 meter di dekat pulau-pulau kecil selatan Banten dan 11,7 meter di Jawa Timur (Setyaningrum, 2021).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak bencana, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk di dalamnya adalah bantuan logistik pada saat status keadaan darurat. Pengarusutamaan manajemen risiko bencana sebagai respon atas kerangka aksi internasional diatas telah diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia melalui 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai artikulasi visi Presiden Jokowi, diantaranya agenda mencapai sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan agenda lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Kementerian Sosial sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Rencana Strategis 2020-2024 menyebutkan bahwa tujuan Kementerian Sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Tujuan ini sejalan dengan agenda global yakni menghapus kemiskinan dan pengurangan dampak sosial ekonomi akibat bencana yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini tentunya sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, secara jelas mandat yang diberikan kepada Kementerian Sosial RI adalah bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan langkah-langkah terpadu dalam pemulihan, dan penguatan sosial tanggap bencana melalui penyediaan bantuan sosial di daerah terdampak pascabencana.

Transformasi fokus penanganan bencana pada pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) membawa perubahan mendasar pada desain program pembangunan dan kedaruratan yang menitikberatkan pada penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pengurangan risiko bencana dimaknai sebagai instrumen untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada. Sehingga berkontribusi pada penguatan resiliensi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Twigg (2004) berargumen bahwa kesiapsiagaan mengacu pada tindakan khusus yang diambil sebelum bencana terjadi (tindakan pencegahan, peringatan dini, fasilitasi respon cepat), selanjutnya mitigasi dimaknai sebagai tindakan untuk meminimalkan dampak dari risiko bencana.

Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa barang logistik persediaan (*bufferstock*) oleh Kementerian Sosial didukung oleh 3 Gudang Regional. Namun kerusakan infrastruktur pasca bencana dan luas wilayah Indonesia yang sering kali sulit diakses menyebabkan waktu tempuh distribusi barang logistik (*bufferstock*) menjadi panjang karena harus mengirimkan logistik dari gudang regional ke titik-titik lokasi bencana. Panjangnya waktu tempuh logistik menuju ke titik lokasi bencana berisiko memicu konflik sosial antar pengungsi karena melampaui *golden times* atau periode kritis untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan. Konflik akibat perebutan bantuan kebutuhan dasar banyak terjadi di berbagai lokasi bencana, seperti yang terjadi pada pengungsi gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat di Tahun 2021, selain jumlah bantuan yang didistribusikan tidak sebanding dengan jumlah pengungsi, juga diakibatkan bantuan datang beberapa hari setelah gempa terjadi (metrotvnews.com, 2021). Tidak hanya konflik sosial antar pengungsi, risiko kejahatan juga dapat muncul akibat dari ketidakcepatan dan ketidaksiapan distribusi logistik di lokasi bencana. Sebagaimana terjadi pada pengungsi bencana likuifaksi di Sulawesi Tengah, tidak hanya berebut makanan, tetapi juga melakukan penjarahan toko/minimarket dan penghentian truk tangki bahan bakar (Utama, 2018).

Adanya kesenjangan dalam pelayanan darurat korban bencana perlu segera disikapi dalam rangka meminimalisir risiko munculnya berbagai permasalahan sosial lain pasca bencana seperti konflik sosial dan keterlantaran. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana melalui pembentukan Lumbung Sosial di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Papua yang terdiri dari 2 provinsi induk (Provinsi Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi Daerah Otonom Baru (Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya) yang

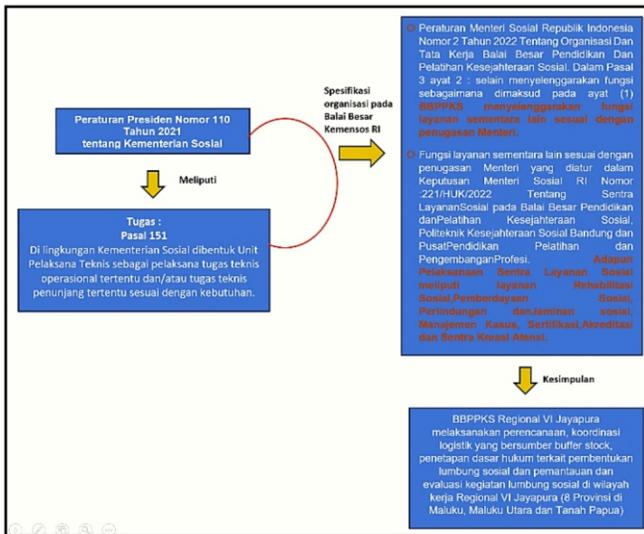
tersebar di 7 wilayah adat dengan karakteristik wilayah yang berbeda merupakan langkah strategis untuk mempercepat dan memangkas waktu tempuh distribusi logistik bantuan korban bencana. Keberadaan Lumbung Sosial merupakan strategi mendekatkan persediaan barang logistik di daerah rawan bencana sehingga kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lumbung Sosial juga merupakan instrumen untuk mendorong pengembangan kapasitas dan partisipasi lokal sehingga sejalan dengan strategi pengurangan risiko bencana.

B. Gagasan Perubahan

Pada masa tanggap darurat bencana, diperlukan respon dan tindakan cepat evakuasi penduduk terdampak bencana, untuk selanjutnya disiapkan lokasi pengungsian (shelter) dan distribusi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pelayanan logistik Kementerian Sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan sebuah keniscayaan sehingga penting untuk menjadi perhatian khusus. **Pemenuhan kebutuhan dasar**, sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor No 24 Tahun 2007, **merupakan hak setiap korban bencana yang harus dipenuhi**. Selanjutnya sebagai Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Klaster Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial mengembangkan inovasi program perlindungan sosial bagi korban bencana yang kini berfokus pada strategi pengurangan risiko bencana dengan memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Salah satu bentuk strategi kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang Nomor No 24 Tahun 2007, diantaranya melalui penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki amanat yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dan OTK Permensos Nomor 20 Tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial adaptif. Sasaran tersebut didukung dengan berbagai program, salah satunya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang memiliki tiga fase penanganan bencana, yaitu pra, saat dan pasca bencana. Pelaksanaan perlindungan sosial kemudian turut diperkuat juga dengan layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Secara lebih jelas, uraian organisasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada

gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Regulasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Besar Kemensos di Regional I – VI dalam Mendukung Manajemen Bencana.

Sumber: Olahan Penulis, 2023

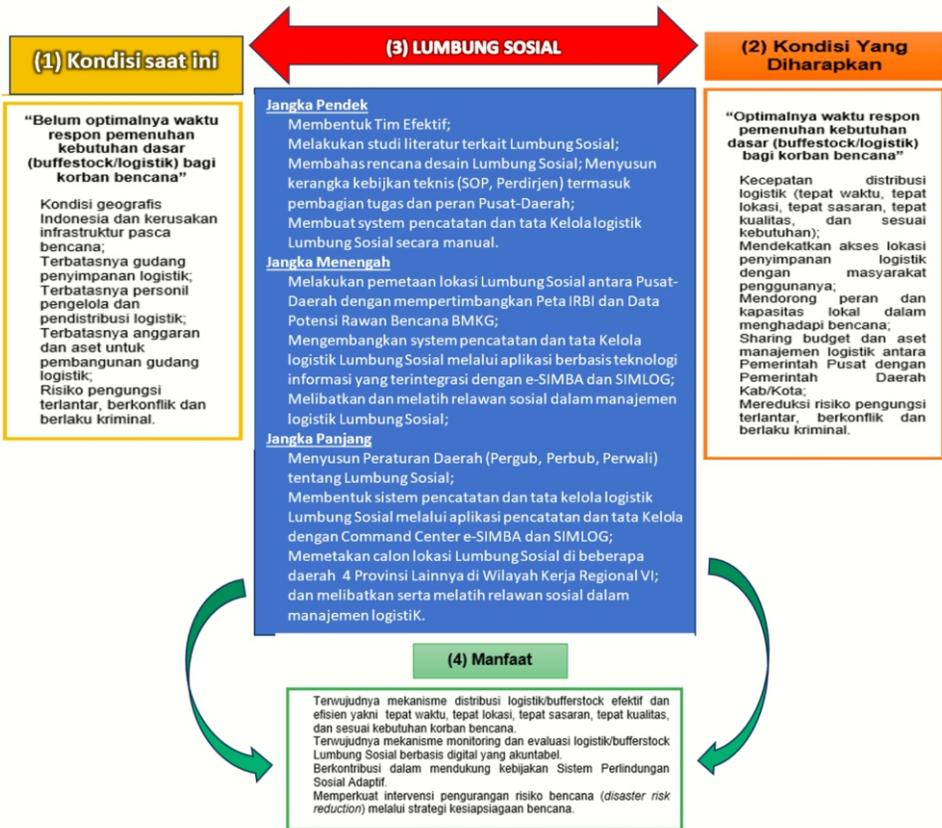
Ide awal kerangka pikir proyek perubahan ini berangkat dari belum optimalnya waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar (bufferstock/logistik) ke lokasi-lokasi pengungsian bencana, sedangkan harus dihadapkan pada *golden times* atau periode kritis pengungsi untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya pada 4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dimekarkan diakhir tahun 2022. Distribusi logistik dinilai belum optimal karena waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar yang belum *realtime* atau membutuhkan rantai distribusi yang panjang hingga berhari-hari untuk sampai di tangan pengungsi. Berbagai argumen menguatkan penyebab belum optimalnya waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Pertama terkait kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari 16.771 pulau dan 62% wilayahnya merupakan perairan menjadi tantangan tersendiri, khususnya Tanah Papua yang masih sangat luas dan masyarakatnya tersebar pada 7 Wilayah Adat Papua dengan keterbatasan akses transportasi darat, laut dan udara. Hal ini diperparah dengan kerusakan infrastruktur pasca terjadi bencana sehingga memperpanjang waktu tempuh distribusi logistik menuju pengungsian membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam.

Kendala geografis Tanah Papua dapat dicontohkan pada wilayah-wilayah terluar dan terpencil dengan risiko tinggi bencana seperti di Pulau Ayau, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Transportasi dari dan menuju ke Ayau dapat ditempuh menggunakan Kapal Sabuk Nusantara (Perintis) yang berangkat menuju Ayau dalam dua – tiga minggu sekali. Sementara lama perjalanan dari Waisai, pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, menuju ke Pulau Ayau pada keadaan dan kondisi normal berkisar 3 - 5 hari, hal ini disebabkan kapal berlabuh lebih dulu pada beberapa pelabuhan dan distrik lainnya di Kabupaten Raja Ampat dan tujuan akhir adalah Ayau. Sementara jika perjalanan kapal sabuk nusantara melakukan *deviasi* trayek maka waktu tempuh berkisar 48 jam dari Kota Sorong menuju Waisai dan Ayau, sedangkan jika terjadi bencana maka logistik akan dikirim dari Gudang Regional Wilayah Timur yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Jayapura, Papua. Kondisi di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Papua, akan sangat berbeda dengan kondisi akses transportasi di wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan yang hampir akses transportasi bervariasi menggunakan kapal, mobil dan pesawat dengan biaya yang sangat tinggi karena terbatasnya sarana transportasi dan bahan bakar minyak yang sangat mahal.

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa dalam upaya penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, Kementerian Sosial didukung oleh 3 Gudang Regional yang berada di Kota Palembang (Wilayah Barat), Bekasi (Wilayah Tengah), dan Makassar (Wilayah Timur). Khusus untuk Tanah Papua, 1 Gudang Sub Region Timur berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jumlah Gudang Regional dan Sub Regional yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sangat terbatas sehingga membutuhkan waktu tempuh yang panjang untuk menuju ke lokasi-lokasi bencana. Terbatasnya personil atau petugas pengelola logistik di masing-masing Gudang Regional maupun Sub Regional dan ketersediaan anggaran serta *asset* untuk pembangunan gudang logistik di masing-masing wilayah risiko tinggi bencana juga menjadi kendala dalam rantai distribusi logistik.

Berdasarkan analisis literatur, kebijakan, regulasi dan *evidence based* diatas maka dipandang penting untuk mengembangkan kebijakan untuk mempercepat waktu salur bantuan kebutuhan dasar (*delivery logistic*) bagi korban bencana. Proyek perubahan ini berfokus pada **Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah**

Papua. Proyek ini berupaya mengembangkan terobosan baru berupa kebijakan terkait inovasi program Lumbung Sosial khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru yang juga rawan terhadap bencana alam dan bencana sosial sehingga diharapkan mampu mendukung kecepatan, kemudahan dan kenyamanan distribusi logistik dengan memotong waktu salur (*delivery logistic*) di lokasi bencana untuk mencapai pelayanan prima. Secara garis besar, pelaksanaan Lumbung Sosial dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan yang ada seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir Proyek Perubahan
Sumber: Olahan Penulis, 2023

Proyek percontohan di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua secara spesifik dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan dan

Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah. Penentuan lokasi proyek percontohan di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua adalah wilayah dengan risiko bencana alam sedang - tinggi dan zona megathrust berbasis pada Peta Indeks Risiko Bencana BNPB dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG. Selain resiko bencana alam, juga terdapat resiko bencana sosial sedang – tinggi.

Daerah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai potensi tinggi terhadap bencana tsunami. Hampir di semua pantai yang mengelilingi Papua Barat Darat Daya termasuk Raja Ampat berpotensi untuk terjadi bencana tsunami, mengingat bahwa sumber gempa penyebab tsunami bisa berasal dari perairan bukan hanya wilayah Papua Barat Daya tetapi juga dari perairan di sekitarnya termasuk di luar Indonesia.

Wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah 3T yaitu terluar, tertinggal dan termiskin yang juga berbatasan dengan negara tetangga Republik Palau. Sebagai wilayah kepulauan, Raja Ampat terdiri dari empat pulau utama yaitu Waigeo, Misol, Batanta, dan Salawati. Selain itu daerah ini memiliki sekitar 610 pulau besar dan kecil, atol dan taka dengan panjang garis pantai 4.860 km, dengan 34 pulau yang berpenghuni. Perbandingan wilayah darat dan laut adalah 1:6, dengan wilayah perairan yang lebih dominan dan berhadapan dengan zona megathrust di barat pulau Papua sehingga berisiko tinggi gempa dan tsunami. Selain itu, letak geografis tersebut juga digambarkan dengan sulitnya akses transportasi dari dan ke Waisai pusat kota Kabupaten Raja Ampat yang hanya dapat ditempuh menggunakan Kapal Perintis (Sabuk Nusantara) selama 7-10 hari. Permasalahan lain di Raja Ampat yakni terkait cuaca buruk. Cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir telah membawa beberapa dampak buruk bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Cuaca buruk tersebut menjadikan semakin sulitnya kapal-kapal dan perahu motor untuk untuk menjangkau pulau tersebut terutama untuk mengangkut kebutuhan masyarakat Raja Ampat seperti kebutuhan pangan, BBM dan kebutuhan lainnya. Selain merusak beberapa bangunan yang ada, cuaca buruk menjadikan masyarakat tidak bisa melaut untuk mencari ikan sedangkan curah hujan yang tinggi menjadikan beberapa tanaman pangan rusak. Kondisi tersebut menjadikan pulau kecil terluar di ujung Timur NKRI menghadapi ancaman kerawanan pangan dan energi.

Lokasi kedua proyek perubahan adalah Kabupaten Maybrat. Kabupaten ini sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Sorong, dengan luas wilayah 5.461,69 km² dan terletak di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, dengan kondisi geologi yang kompleks akibat

pertemuan antara tiga lempeng yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. Wilayah Papua Barat Daya terdiri dari sesar-sesar normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna sehingga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tercatat pada 2014, gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Maybrat dan merusak 113 rumah warga dan fasilitas publik. BPBD Maybrat (2022) melaporkan kejadian banjir pada Juli 2022 akibat curah hujan tinggi menimbulkan 33 rumah warga, 1 unit sekolah dan 1 unit kantor kampung di 6 kampung terendam. Selain bencana alam, Maybrat juga merupakan daerah rawan konflik sosial yang berkepanjangan dan menjadi masalah sosial serius. Sepanjang 2021, sejumlah konflik kembali meletup di Tanah Papua. Terakhir, pecah konflik yang menasar markas Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat. Konflik Papua merupakan konflik vertikal dan berlangsung lebih dari 50 tahun. Situasi yang terjadi berkepanjangan di Papua dan Papua Barat disebabkan empat akar permasalahan, yakni sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, operasi militer yang menyebabkan pelanggaran HAM, stigmatisasi yang memarginalkan, dan kegagalan pembangunan Papua. Penyerangan OPM/TPNPB terhadap markas Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat. Tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa, karena berkaitan dengan dinamika politik lokal dan nasional yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Sedangkan lokasi Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan merupakan daerah tertinggal dan termiskin. Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo, termasuk daerah dataran tinggi Papua yang terkena dampak suhu ekstrim (hujan es), rawan longsor akibat tingginya curah hujan dan daerah rawan konflik sosial. Seringkali terjadi suhu ekstrim dan hujan es pada musim-musim tertentu dan berbarengan dengan konflik sosial ulah gerakan anti pemerintah Indonesia (KKB) di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak dan beberapa daerah lainnya di Papua Tengah dan Papua Pegunungan dan menimbulkan dampak multidimensional. Sementara Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, merupakan salah satu daerah di Selatan Papua yang masih tertinggal, rawan bencana diantaranya kekeringan, kebakaran lahan, gizi buruk, kesehatan, banjir rob dan bencana sosial. Untuk menuju ke Dogiyai, Lanny Jaya, Yahukimo dan Asmat diperlukan transportasi udara, darat dan laut dengan biaya yang sangat tinggi karena kondisi wilayahnya yang masih minim infrastruktur jalan dan telekomunikasi. Disamping itu, wilayah

tersebut sangat rawan akibat gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menimbulkan banyak korban jiwa warga sipil dan aparat TNI-POLRI. Sehingga apabila terjadi bencana kemungkinan kesulitan mengakses transportasi untuk pengiriman barang logistik cukup tinggi.

Kondisi yang diharapkan dari inovasi proyek perubahan ini adalah optimalnya waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Distribusi logistik dinilai optimal jika memenuhi harapan penerima layanan dalam hal ini korban bencana, yakni pemenuhan kebutuhan dasar dapat **tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, dan sesuai kebutuhan**. Keberadaan Lumbung Sosial mampu mendekatkan akses lokasi penyimpanan logistik dengan masyarakat penggunaannya. Selanjutnya seiring dengan agenda kebijakan internasional dalam manajemen bencana bahwa keberadaan Lumbung Sosial diharapkan mampu mendorong peran dan kapasitas lokal dalam menghadapi risiko bencana. Bentuk peran dan kapasitas lokal tidak hanya terkait partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk turut mengalokasikan anggaran dan menyediakan *asset* untuk kepentingan pengelolaan Lumbung Sosial. Keberadaan Lumbung Sosial juga diharapkan mampu mencegah munculnya berbagai permasalahan sosial lain pasca kejadian bencana diantaranya risiko keterlantaran pengungsi, konflik sosial akibat perebutan logistik, dan kejahatan kriminal (penjarahan, pencurian).

Dalam manajemen strategis, pemetaan dan analisis situasi baik eksternal maupun internal organisasi menjadi penting. Tools yang digunakan dalam langkah ini adalah analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*). Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan koneksi antar kuadran dalam analisis SWOT untuk menyusun strategi yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam rencana program Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT dalam Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua:

Proyek Percontohan di Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Maybrat, Dogiyai, Lanny Jaya, Yahukimo dan Asmat

Internal	<p>Strengths:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LS sebagai mandat pengurangan risiko bencana (PRB) telah ditetapkan sebagai kerangka aksinasional (RPJMN, Renstra). 2. LS sebagai mandat pengembangan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana. 3. Memiliki sistem manajemen logistik berbasis teknologi informasi yang telah berjalan (e-SIMBA, SIMLOG) 4. LS dapat berfungsi sebagai transshipment (titik tengah/persinggahan). 5. Adanya kebutuhan percepatan distribusi logistik, seiring dengan ancaman megathrust gempa dan tsunami terutama di Pulau Papua. 6. Potensi perluasan program cukup besar, sehingga program dapat dikolaborasi guna mendukung infrastruktur yang resilien sebagai bagian dalam mendukung Perlindungan Sosial Adaptif. 	<p>Weaknesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemungkinan resiko permasalahan dalam pencatatan dan tata kelola logistik dikarenakan faktor SDM yang kurang kompeten. 2. Efisien anggaran pengiriman, namun berisiko tinggi di anggaran pengadaan logistik karena banyaknya titik LS yang tersebar di 4 provinsi DOB dengan akses transportasi yang sangat tinggi. 3. Risiko kecemburuan sosial bahkan konflik sosial pada masyarakat yang wilayahnya tidak mendapat LS.
	External	

Opportunities:

1. LS sebagai mandat pengurangan risiko bencana (PRB) telah ditetapkan sebagai kerangka aksi global (SDG's agenda 13 dan SFDRR 2015-2030).

S-O:

1. (S1, S2, S4, S5, S6 & O1) Melakukan penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi teknis termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah terkait LS (Kepdirjen, SOP)
2. (S3 & O1) Pencatatan dan tata kelola logistik LS secara manual di Provinsi DOB, juga didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi dengan e-SIMBA dan SIMLOG

W-O:

1. (W1, W2, W3 & O1)
 - Melakukan penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi teknis termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah terkait LS (Kepdirjen, SOP).
 - Pencatatan dan tata kelola logistik LS di DOB secara manual, tetapi juga didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi dengan e-SIMBA dan SIMLOG.
 - Pelibatan Relawan Sosial dalam pengelolaan/ manajemen logistik LS. Diperkuat dengan pelatihan dan penguatan kapasitas.
2. (W3 & O1) Penentuan lokasi LS berbasis pada pemetaan oleh Pusat-Daerah dengan mempertimbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG, wilayah dengan risiko multi bahaya tingkat tinggi sebagai prioritas.

Threats:

1. Risiko Pemda DOB tidak mengalokasikan anggaran dan SDM untuk tata kelola logistik LS.
2. Dihadapkan dengan egosektoral, lemahnya koordinasi, penangan sektoral dan terfragmentasi antara Pusat-Daerah

S-T:

1. **(S1, S2, S3, S4, S5, S6 & T1)** Melakukan penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi teknis termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah terkait LS (Kepdirjen, SOP).
2. **(S1, S2, S3, S4, S5, S6 dan T2)** Penentuan lokasi LS berbasis pada pemetaan oleh Pusat-Daerah dengan mempertimbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG, Data Potensi Rawan Konflik Sosial, wilayah dengan risiko multi bahaya tingkat tinggi sebagai prioritas.

W-T:

1. **(W2, T1 & T2)** Pencatatan dan tata kelola logistik LS secara manual dan didukung oleh teknologi informasi yang terintegrasi dengan e-SIMBA dan SIMLOG.
2. **(W2, W3, & T2)** Penentuan lokasi LS berbasis pada pemetaan oleh Pusat-Daerah dengan mempertimbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG, Data Potensi Rawan Konflik Sosial, wilayah dengan risiko multi bahaya tingkat tinggi sebagai prioritas.

Analisis di atas menyimpulkan bahwa rencana strategis yang harus disiapkan dalam mendukung Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua di antaranya :

1. Melakukan penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum, kebijakan, dan regulasi teknis termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah terkait LS (Kepdirjen, SOP).
2. Pencatatan dan tata kelola logistik LS secara manual yang dipadukan dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi real time.
3. Pelibatan Relawan Sosial dalam pengelolaan/ manajemen logistik LS. Diperkuat dengan pelatihan dan penguatan kapasitas.
4. Penentuan lokasi LS berbasis pada pemetaan oleh Pusat-Daerah dengan mempertimbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG, Data Potensi Konflik Sosial, wilayah dengan risiko multi bahaya tingkat tinggi sebagai prioritas.

Dengan adanya proyek perubahan inovasi Lumbung Sosial diharapkan akan dihasilkan sistem dan sarana pendukung mitigasi bencana berbasis lokasi dan masyarakat lokal di daerah rawan bencana yang terintegrasi dengan data daerah rawan bencana BMKG dan data daerah rawan konflik sosial. Aspek utama yang ingin diangkat dalam proyek perubahan ini adalah memfasilitasi masyarakat di dalam upaya pengurangan resiko bencana dan pengelolaan logistik penanganan bencana sehingga memperkuat infrastruktur tangguh bencana pada tingkat lokal, khususnya 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Karena itu pemenuhan isi Lumbung Sosial juga perlu disusun dengan rinci dan memperhatikan regulasi terkait agar tepat guna dan tepat sasaran. Berikut rencana bantuan logistik Lumbung Sosial yang sudah mengacu pada peraturan yang ada, dapat dilihat pada bagan berikut:

Bantuan Sandang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian laki-laki dewasa; 2. Pakaian dan kebutuhan khusus Perempuan dewasa; 3. Pakaian anak laki-laki dan Perempuan; 4. Pakaian seragam sekolah anak laki-laki; 5. Pakaian seragam sekolah anak perempuan; 6. Pakaian lainnya sesuai kebutuhan; 7. Selimut; dan/atau 8. Kidware. 	Bantuan Pangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Beras; 2. Mie instan; 3. Ikan/daging kemasan; 4. Kecap kemasan; 5. Minyak goreng kemasan; 6. Makanan siap saji; dan/atau 7. Makanan lainnya sesuai kebutuhan. 	Bantuan Penyediaan tempat penampungan sementara <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenda pengungsi; 2. Tenda keluarga; 3. Tenda dapur umum; 4. Tenda gulung; 5. Tenda logistik; 6. Velbed; 7. Matras/tikar/alas tikar; dan/atau 8. Kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan.
Bantuan Pelayanan Psikologi <ol style="list-style-type: none"> 1. Paket peralatan terapi bermain; dan/atau 2. Mainan anak-anak. 	Bantuan Kebutuhan dapur umum, air bersih, dan sanitasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan dapur; 2. Perlengkapan makan; 3. Air bersih; dan/atau 4. Perlengkapan toilet umum. 	Bantuan Pelayanan Kesehatan <p>Obat-obatan</p>

Gambar 4. Rincian Bantuan Logistik Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Bencana
Sumber: Olahan Penulis, 2023

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1272);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana; dan
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

D. Tujuan Dan Manfaat Untuk Organisasi Adaptif

1. Tujuan

Tujuan utama gagasan Proyek Perubahan ini adalah untuk meningkatkan peran BBPPKS Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura dalam pelaksanaan tugas multi layanan dan membantu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua yaitu Provinsi

Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap permasalahan yang dihadapi terkait lama nya waktu respon distribusi pemenuhan kebutuhan dasar (*bufferstock/logistik*) bagi korban bencana sehingga mengurangi risiko melampaui *golden times* atau periode kritis untuk mendapatkan pertolongan kemanusiaan. Dengan demikian Kementerian Sosial RI melalui BBPPKS Regional VI Jayapura mampu mewujudkan diri sebagai unit eselon II yang adaptif perubahan dan responsif terhadap arah kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif bagi korban bencana sebagai salah satu strategi reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Selanjutnya, kepemimpinan partisipatif (*participatory leadership*) dalam semangat otonomi khusus untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua yang dinamis seperti saat ini menempati posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Proyek Perubahan ini berupaya untuk mencapai tujuan utama melalui 3 (tiga) tahapan tujuan, diantaranya:

a. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai Bulan September s.d November 2023 antara lain adalah:

- 1) Membentuk tim efektif;
- 2) Melakukan studi literatur terkait Lumbung Sosial;
- 3) Membahas rencana desain Lumbung Sosial;
- 4) Menyusun kerangka kebijakan teknis (SOP, Kepdirjen) termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah,
- 5) Melakukan pemetaan lokasi Lumbung Sosial antara Pusat-Daerah dengan mempertimbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG dan Data Daerah Potensi Rawan Konflik Sosial.
- 6) Pelaksanaan uji coba pembentukan Lumbung Sosial di beberapa lokasi *Pilot project* di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.

b. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah akan dicapai pada 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu Bulan November 2023 adalah:

- 1) Melibatkan serta melatih relawan sosial dalam manajemen logistik Lumbung Sosial.
- 2) Membentuk sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial melalui aplikasi pencatatan dan tata kelola logistik yang terintegrasi dengan Command Center dan e-SIMBA di Balai Besar Regional VI Jayapura;

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang akan dicapai pada 4 (empat) bulan berikutnya yaitu Bulan November 2023 adalah:

- 1) Menyusun Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Lumbung Sosial;
- 2) Mengembangkan sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial melalui aplikasi berbasis teknologi informasi *real time*.
- 3) Melakukan perluasan pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan bencana di 8 Provinsi wilayah kerja Balai Besar Regional VI Jayapura meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

2. Manfaat

Penerima manfaat dari Proyek Perubahan ini terdiri dari pihak eksternal maupun internal.

a. Pihak Internal

Pihak internal penerima manfaat Proyek Perubahan ini adalah Balai Besar Regional VI Jayapura secara khusus, dan Kementerian Sosial secara umum dan sekaligus sebagai Langkah responsif atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditugaskan kepada Kementerian Sosial.

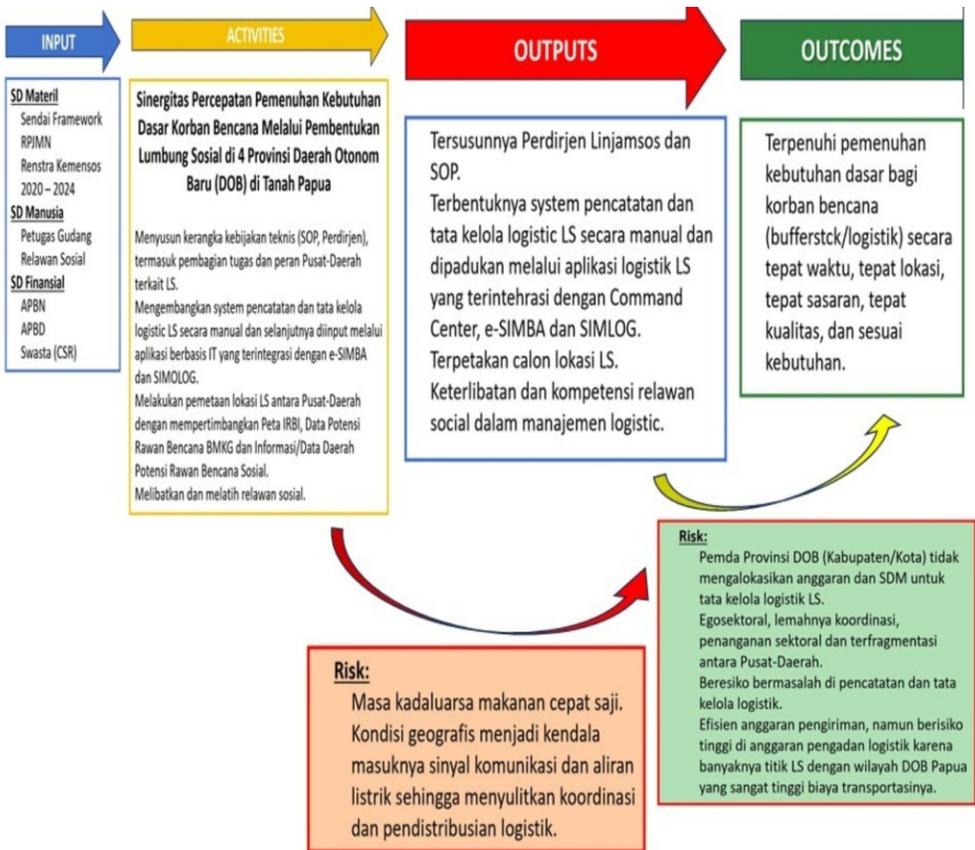
b. Pihak Eksternal

Pihak eksternal penerima manfaat Proyek Perubahan ini adalah korban bencana, Pemerintah Daerah 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.

Adapun manfaat Proyek Perubahan ini diantaranya:

- Terwujudnya mekanisme distribusi logistik/bufferstock efektif dan efisien yakni tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, dan sesuai kebutuhan korban bencana.
- Terwujudnya mekanisme monitoring dan evaluasi logistik/bufferstock Lambung Sosial secara manual dan berbasis digital yang akuntabel.
- Berkontribusi dalam mendukung kebijakan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif.
- Memperkuat intervensi pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) melalui strategi kesiapsiagaan bencana.

E. Output dan Outcome



Gambar 5. Skema Rancangan Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lambung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua

Sumber: Olahan Penulis, 2023

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan

Tabel 2. Timeline Rencana Proyek Perubahan Periode September - November 2023

No	Tahapan	Outputs	Waktu	Penanggung Jawab	Evidence
Jangka Pendek					
1	Membentuk tim efektif	Terbentuknya tim	Minggu ke-IV September	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader Tim Efektif 	SK Tim Efektif
2	Melakukan studi literatur dan penyusunan grand desain LS	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data dukung dan literatur terkait LS Tersedianya grand desain LS 	Minggu ke-I Oktober s/d Minggu ke-II Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader Tim Efektif 	Notulensi Rapat, Absensi, Dokumentasi
3	Menyusun kerangka kebijakan Lumbung Sosial (Keputusan Direktur Jenderal, SOP)	Tersedianya kerangka kebijakan LS	Minggu ke-II Oktober s/d Minggu ke-III Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader Tim Efektif 	Kepdirjen, SOP terkait LS
4	Memetakan calon lokasi LS dengan mengacu pada Peta IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG	Terpetakannya lokasi LS	Minggu ke-IV Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader Tim Efektif 	Daftar Lokasi LS
5	Membentuk Lumbung Sosial di beberapa titik lokasi <i>Pilot project</i>	Tersedianya LS di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua	Minggu ke-IV Oktober s/d Minggu ke-II November	<ul style="list-style-type: none"> Project Leader Tim Efektif 	Laporan Kegiatan, Dokumentasi

Jangka Menengah

1	Meningkatkan kapasitas relawan sosial dalam manajemen logistik LS	Keterlibatan relawan sosial	Minggu ke-III November	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader • Tim Efektif 	Laporan Kegiatan Pelatihan, Dokumentasi
2	Membentuk sistem pencatatan dan tata kelola logistik LS	Tersedianya database LS	Minggu ke-III s/d IV September	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader • Tim Efektif • Tim IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Format Manual Pelaporan Logistik • Dashboard e-SIMBA

Jangka Panjang (Mulai Tahun 2024)

1	Perluasan Lumbung Sosial di 8 Provinsi di wilayah kerja Balai Besar Regional VI Maluku - Papua	Terbentuknya Lumbung Sosial di 8 Provinsi	Minggu ke-I s/d IV Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader • Tim Efektif 	Daftar Lumbung Sosial, Laporan
2	Implementasi sistem manajemen logistik yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center.	Terbentuknya sistem pencatatan LS terintegrasi	Minggu ke-I s/d IV Februari	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader • Tim Efektif • Tim IT 	Data base LS yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center
3	Menyusun Peraturan Gubernur, Bupati, Walikota tentang LS	Tersusunnya Peraturan Gubernur, Bupati, Walikota tentang LS	Minggu ke-I s/d IV Maret	<ul style="list-style-type: none"> • Project Leader • Tim Efektif 	Draft Pergub, Perbup, Perwali tentang LS

			<ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan
3.	Vivien Sarambu	Pengendali	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengendalikan jalannya proyek perubahan di Tim Substansi dan penyediaan sarana prasarana
4.	Fonda Waramori	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan dukungan administrasi penyelenggaraan rapat koordinasi ● Menulis Notulen ● Mendokumentasikan kegiatan tahapan proyek perubahan
5.	Kasim Saleh	Tim Substansi	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghimpun dan melengkapi need analysis dalam pembuatan proyek perubahan ● Melaksanakan inventarisasi board yang akan diinput dan sinkronisasi diagram alur kerja dan tata waktu dari unit-unit terkait ● Mengumpulkan data dukung terkait dengan proyek perubahan ● Membuat draft revisi Petunjuk Teknis Lumbung Sosial
6.	Burhanudin	Tim Substansi	
7.	Achmad Nurofiq	Tim Substansi	
8.	Lifyarman	Tim Substansi	
9.	Nur Hardiyah	Tim Substansi	
10.	Eunike Mramra	Tim Substansi	
11.	Zaenal Arifin	Tim Substansi	
12.	Yason Lensru	Tim Substansi	
13.	Siti Fitriani	Tim Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengarsipan dan dokumentasi ● Membuat SK-SK Tim ● Membuat, mengumpulkan dan menyimpan form-form dukungan pemangku kepentingan
14.	Firmansyah Boeang	Tim IT	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk dan membuat aplikasi sesuai keperluan ● Melakukan pengimputan dan pengecekan data ke dalam aplikasi ● Mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaiki aplikasi sesuai dengan masukan yang diterima dan permasalahan yang dihadapi
15.	Irwan Andi	Tim IT	
16.	Maria Mandosir	Tim IT	
17.	Akmin Kisamlu	Tim IT	

B. Tata Kelola Proyek Perubahan

Tabel 3. Tim Efektif

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Robben Rico, A.Md.LLAJ., SH, ST., M.Si	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">● Memberikan arahan terkait pembentukan, penggunaan dan implementasi Lumbung Sosial● Memberikan arahan kebijakan teknis implementasi pemanfaatan Lumbung Sosial
2.	John Herman Mampioper	Project Leader	<ul style="list-style-type: none">● Menyusun proyek perubahan secara utuh, mulai dari rancangan proyek perubahan sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan● Menjalankan proyek perubahan dan mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan proyek● Mempersiapkan/merencanakan dokumen/instrument/waktu yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor● Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach● Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan terkait (internal dan eksternal)● Membuat laporan Rancangan Proyek Perubahan● Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki● Melaksanakan proyek perubahan sesuai target milestone● Mengumpulkan dokumen kegiatan yang dijadikan bukti dalam evaluasi dan sebagai bahan pelengkap laporan kegiatan

Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan memerlukan berbagai sumber daya. Sumber daya yang digunakan antara lain sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang digunakan dalam proyek perubahan ini sebagian besar dilaksanakan ASN pada Balai Besar Regional VI Jayapura Kementerian Sosial yang bekerja sesuai dengan keahlian dan tugas yang dikerjakan sehari-hari dan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga dapat mengurangi biaya yang timbul. Berikut ini rincian sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan proyek perubahan.

Tabel 4. Rencana Anggaran Proyek Perubahan

No.	Uraian	Vol	Sat	Harga	Jumlah	Deskripsi
A. SUMBER DAYA						
1.	Personil Pelaksana	13	ORG	-	13 Orang	ASN dan PPNPN pada BBPPKS Reg VI Jayapura
2.	Sarana dan prasarana					
	Ruang Rapat				1 Ruang	Ruang Rapat BBPPKS Reg VI Jayapura
	Komputer/ Laptop				8 Laptop, 3 PC	BMN yang digunakan tim efektif sehari-hari
	Aplikasi/ kebutuhan IT/ Jaringan internet				WIFI/LAN	Menggunakan Jaringan Internet Kantor
B. ANGGARAN						
1.	Jangka Pendek				Rp 10.000.000	
	Rapat Persiapan dan Penyusunan Dokumen					
	Konsumsi Rapat [20 ORG X 3 KL]	10	OK	Rp 100.000	Rp 10.000.000	Konsumsi Rapat

	Asesmen Uji Coba Pembentukan Lumbung Sosial				Rp 70.200.000	
	Uang Harian Petugas [2 ORG x 3 HR x 3 LOK]	18	OH	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
	Hotel Petugas [2 ORG x 4 HR x 3 LOK]	24	OH	Rp 550.000	Rp 13.200.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
	Transport Petugas [2 ORG x 1 KL x 6 LOK]	12	OT	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
	Pembentukan Lumbung Sosial				Rp 232.212.050	
	Pengiriman Barang [1 PKT x 1 LOK]	1	PKT	Rp 93.972.050	Rp 93.972.050	Pengiriman Barang Logistik Lumbung Sosial
	Uang Harian Petugas [6 ORG x 3 HR x 6 LOK]	180	OH	Rp 430.000	Rp 46.440.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
	Hotel Petugas [6 ORG x 2 HR x 3 LOK]	26	OH	Rp 550.000	Rp 19.800.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
	Transport Petugas [6 ORG x 1 KL x 3 LOK]	18	OT	Rp 4.000.000	Rp 72.000.000	Perjalanan Dinas Luar Kota
2.	Jangka Menengah				-	
	Pengenalan Pelaporan Online					Online
	Kebutuhan Anggaran				Rp 312.412.050	

**Anggaran dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA-027.01.2.690555/2023*

C. Identifikasi dan Analisis Stakeholders

Dalam mencapai tujuan organisasi maka sangat penting untuk melakukan identifikasi stakeholder. Siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Stakeholders yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Dally, 2015). Stakeholder dalam pelaksanaan proyek perubahan ini berasal dari internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial maupun eksternal dari Kementerian dan Lembaga, diantaranya sebagai berikut:

1. Stakeholders Internal dan Eksternal

Stakeholder internal instansi pemerintah antara lain atasan langsung, kepala instansi yang bersangkutan, seluruh kolega di instansinya, serta para bawahannya. Sedangkan stakeholder eksternal antara lain pejabat dari instansi pusat maupun daerah, masyarakat, LSM, para peneliti dari lembaga penelitian, dan dosen terkait, dan lain-lain. Stakeholders dimaksud dapat bersifat individu maupun organisasi.

Tabel 5. Stakeholders Internal dan Eksternal



Berikut beberapa analisis peran yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder internal maupun eksternal :

Tabel 6. Peran Stakeholder Internal

NO.	STAKEHOLDER INTERNAL	PERAN
1	Menteri Sosial dan Sekjen Kemensos	Memberi dukungan pelaksanaan pembentukan Lumbung Sosial di daerah rawan bencana di Indonesia, termasuk di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua
	Sekjen Kemensos	Koordinasi dalam perancangan peraturan terkait Program Lumbung Sosial; Koordinasi dalam perencanaan anggaran; dan Koordinasi dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi kegiatan pembentukan Lumbung Sosial.
2	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur PSKBA	Memberikan dukungan dalam memberikan Analisa data rawan dan simulasi pembentukan lumbung sosial
3	BBPPKS Kemensos RI Regional VI Jayapura	Memberikan dukungan dalam implementasi proyek perubahan di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua

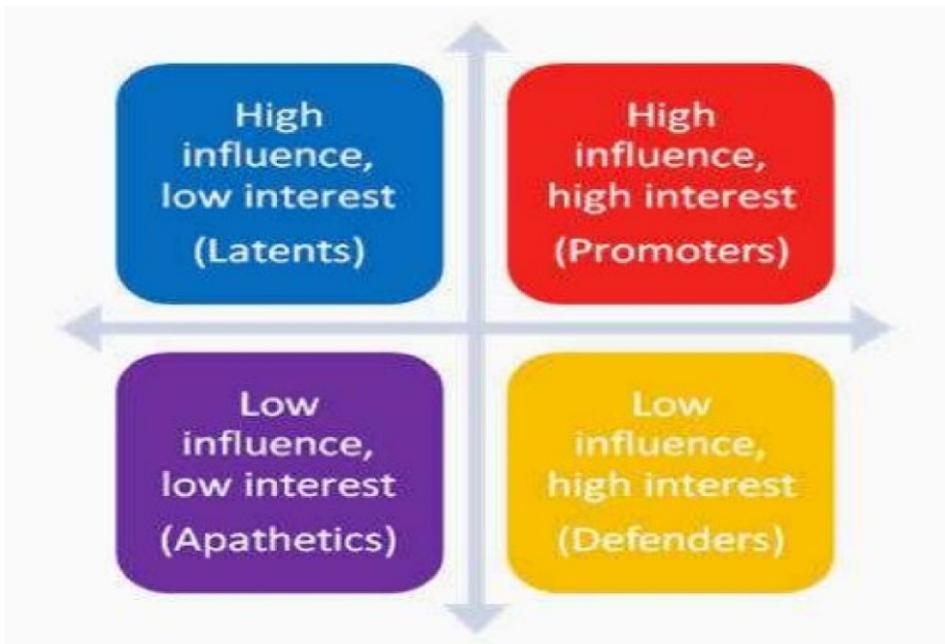
Tabel 7. Peran Stakeholder Eksternal

NO.	STAKEHOLDERS EKSTERNAL	PERAN
1	BNPB/BPBD	Koordinasi terkait data rawan bencana berdasarkan IRBI
2	BMKG	Koordinasi dalam informasi awal meteorologi, klimatologi dan geofisika
3	Pemerintah Daerah (4 Provinsi DOB di Tanah Papua)	Koordinasi terkait pembentukan Lumbung Sosial
4	Lembaga Gereja (Sinode GKI di Tanah Papua, Keuskupan Gereja Katholik	Koordinasi terkait pembentukan Lumbung Sosial
5	TNI – POLRI	Koordinasi terkait pembentukan Lumbung Sosial
6	Lembaga Adat (Dewan Adat Papua)	Koordinasi terkait pembentukan Lumbung Sosial
7	Relawan Sosial	Koordinasi terkait pendampingan pengiriman distribusi logistik pada lokasi uji coba Lumbung Sosial.

2. Analisis Stakeholders

Melakukan analisis terhadap *stakeholder* merupakan langkah yang sangat penting karena proses penyusunan program harus melibatkan pihak-pihak yang memang paham terhadap bidang terkait sebagai mitra dalam pelaksanaan program. Dengan melakukan analisis terhadap *stakeholder* maka dapat memetakan dengan jelas tentang posisi stakeholder terhadap program yang akan dirancang/dijalankan.

Dalam memetakan Stakeholder, penulis menggunakan matriks Analisa Stakeholder dengan menggunakan empat kuadran sebagaimana gambar dibawah



Gambar 6. Matriks Analisa Stakeholder

Sumber: (<http://ctb.ku.edu/en/table-ofcontents/participation/encouraginginvolvement/identify-stakeholders/main>).

1. Promoters, Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya). Promotor disini pihak yang terlibat yaitu Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, Dirjen Linjamsos dan Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura.
2. Defenders: Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan. Yang termasuk pihak defender TNI-POLRI dan Lembaga Gereja.
3. Latents, Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah (4 Provinsi DOB, Kab/ Kota) calon lokasi Lumbung Sosial
4. Apathetics Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan dalam hal ini contohnya seperti Perguruan Tinggi, Dewan Adat Papua, BBMKG Papua, Relawan Sosial calon pengelola LS, masyarakat calon lokasi LS.

Berikut tabel analisa stakeholder yang telah disesuaikan dengan rencana implementasi proyek perubahan.

Tabel 8. Analisa Stakeholder Yang Telah Disesuaikan Dengan Rencana Implementasi Proyek Perubahan

No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Dukungan (Power)	Pengaruh (Influence)	Analisa Stakeholder
A. Stakeholder Internal					
1	Menteri Sosial	Laporan			Promoters
2	Sekjen Kemensos	Laporan			Promoters
3	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Laporan			Promoters
4	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Koordinasi			Promoters

5	BBPPKS Reg.VI Jayapura	Laporan			Promotors
---	---------------------------	---------	--	--	-----------

B. Stakeholder Eksternal

1	Pemda Provinsi	Laporan			Latens
2	Lembaga Gereja	Laporan			Defenders
3	BMKG	Koordinasi			Apathetics
4	Badan SAR	Koordinasi			Apathetics
5	TNI - POLRI	Koordinasi			Defenders
6	Dewan Adat	Informasi			Apathetics
7	Perguruan Tinggi	Informasi			Apathetics
8	Relawan Sosial	Informasi			Apathetics
9	Masyarakat	Informasi			Apathetics

D. Identifikasi Potensi Risiko Dan Rencana Solusi

Pada tataran pelaksanaan program, terdapat kemungkinan potensi risiko yang akan mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan program, hal ini perlu diantisipasi agar kemudian tidak menjadi masalah besar dikemudian hari. Berikut potensi risiko yang terdapat pada program Lambung Sosial.

Tabel 9. Potensi Risiko dan Rencana Solusi

No	Potensi Risiko	Rencana Solusi
1	Masa kadaluarsa makanan cepat saji.	Mengintegrasikan pengecekan berkala makanan kedalam sistem pencatatan serta perlunya klausul pemanfaatan makanan yang sudah mendekati masa kadaluarsa.
2	Kondisi geografis menjadi kendala masuknya sinyal komunikasi dan aliran listrik sehingga menyulitkan koordinasi dan pendistribusian	Dukungan pemasangan Router, Orari, Rapi, Internet, dan berbagai alat komunikasi seperti HT dan Handphone (WhatsApp dan SMS).

	logistik.	
3	Pemda Provinsi 4 DOB tidak mengalokasikan anggaran dan SDM untuk tata kelola logistik LS	Memobilisasi relawan sosial termasuk menyiapkan tali asih non reguler
5	Egosektoral, lemahnya koordinasi, penanganan sektoral dan terfragmentasi antara Pusat-Daerah	Pelibatan Pemerintah Daerah dalam proses pemetaan, penentuan lokasi LS, hingga manajemen logistik LS.
6	Berisiko bermasalah di pencatatan dan tata kelola logistik.	Disiapkan mekanisme pencatatan manual yang akan diinput ke dalam pencatatan berbasis IT
7	Efisien anggaran pengiriman, namun berisiko tinggi di anggaran pengadaan logistik karena banyaknya titik LS.	Wilayah dengan risiko multi bahaya tingkat tinggi sebagai prioritas (berbasis Peta IRBI, Data Potensi Rawan Bencana BMKG, Data Potensi Rawan Konflik/Bencana Sosial)

E. Indikator Keberhasilan

Pada tataran pelaksanaan program, terdapat kemungkinan potensi risiko yang akan mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan program

1. Ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Lumbung Sosial
2. Ditetapkannya pedoman teknis Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Lumbung Sosial
3. Terlaksananya Uji coba pembentukan Lumbung Sosial dengan di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua meliputi Provinsi Papua Barat Daya (Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat), Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Dogiyai), Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo) dan Provinsi Papua Selatan (Kabupaten Asmat)

4. Meningkatnya kapasitas relawan sosial dalam manajemen logistik Lumbung Sosial
5. Terbentuknya sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial secara manual di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua yang akan dihubungkan dengan aplikasi pencatatan dan tata kelola logistik yang terintegrasi sebagaimana skema IoT (Internet of Things).
6. Terpenuhinya layanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana secara **tepat waktu, tepat sasaran dan tepat bantuan**.

F. Faktor Kunci Keberhasilan

Keberhasilan inovasi perubahan dsangat tergantung dari faktor kunci sebagai berikut

1. Sosialisasi dan internaslisasi project kepada stakeholders terkait proyek perubahan
2. Dukungan dan komitmen sponsor dalam hal ini Mentor, tim efektif, Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang di level propinsi dan Kab/ Kota di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua
3. Kerjasama dengan TNI - POLRI di Tanah Papua
4. Kerjasama dengan Lembaga Gereja dan Lembaga Adat di Tanah Papua
5. Kerjasama tim dan ketepatan jadwal kegiatan sesuai dengan timeline yang disusun
6. Koordinasi dan kerjasama yang dibangun dengan stakholders untuk menjaga tetap mendukung proyek inovasi ini berjalan sesuai rencana.
7. Merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di daerah rawan bencana di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai implementasi proyek perubahan dan pencapaiannya pada jangka pendek dan jangka menengah dengan membandingkan dengan timeline rencana yang telah disusun sebelumnya. Pembahasan selanjutnya menganalisis peta stakeholder, rencana dan implementasi strategi marketing, kendala internal dan eksternal serta upaya mengatasi kendala, dan mekanisme monitoring evaluasi pelaksanaan proyek perubahan.

A. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek dan Jangka Menengah

1. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek

Implementasi proyek perubahan dilaksanakan pada tanggal 5 September s/d 13 November 2023. Capaian proyek perubahan dalam jangka pendek tergambar pada tabel berikut:

Tabel 10. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek
Periode September s/d November 2023

No	Tahapan dan Kegiatan	Timeline		Dokumen Pendukung
		Rencana	Implementasi	
1	Pembentukan Tim Efektif 1. Pembentukan dan penyusunan tim efektif 2. Menyusun skema strategi dan timeline proyek perubahan	Minggu ke-II, September	18 September 2023 Minggu ke-II, September	SK Tim Efektif
2	Pembahasan studi literatur dan grand desain Lumbung Sosial 1. Pengumpulan data dan literatur kaitan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 2. Pembahasan grand desain proyek perubahan yakni Program Lumbung	Minggu ke-IV September s/d Minggu ke-II Oktober	28 September / 13 Oktober 2023 Minggu ke-IV September s/d Minggu ke-II Oktober	Notulensi Rapat, Absensi, dan Dokumentasi

	Sosial 3. Penyusunan draft proyek perubahan			
3	Penyusunan kerangka kebijakan Lumbung Sosial 1. Pembahasan dan penyusunan Keputusan Direktur Jenderal tentang Lumbung Sosial; 2. Pembahasan dan penyusunan standar operasional prosedur tentang Lumbung Sosial.	Minggu ke-III Oktober s/d Minggu ke I November	16 Oktober s/d 3 November 2023 s/d Minggu ke-III Oktober s/d Minggu I November	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal tentang Lumbung Sosial Standar Operasional Prosedur tentang Lumbung Sosial
4	Pemetaan calon lokasi Lumbung Sosial 1. Analisis data lokasi/kawasan risiko tinggi bencana menggunakan IRBI, Data Potensi Rawan Bencana BMKG dan Informasi/Data Daerah Rawan Konflik Sosial 2. Visitasi ke BMKG untuk audiensi terkait peta lokasi calon Lumbung Sosial	Minggu ke-III s/d IV Oktober	16 s/d 20 Oktober 2023 Minggu ke-III Oktober	Peta calon lokasi Lumbung Sosial

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Secara umum seluruh kegiatan dalam milestone capaian jangka pendek telah berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, bahkan pada tahap penyusunan kerangka kebijakan Lumbung Sosial dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, karena Lumbung Sosial menjadi salah satu inovasi program yang menjadi prioritas di Lingkungan Kementerian Sosial RI. Tahapan implementasi proyek perubahan, “Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan

Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua” pada jangka pendek adalah sebagai berikut:

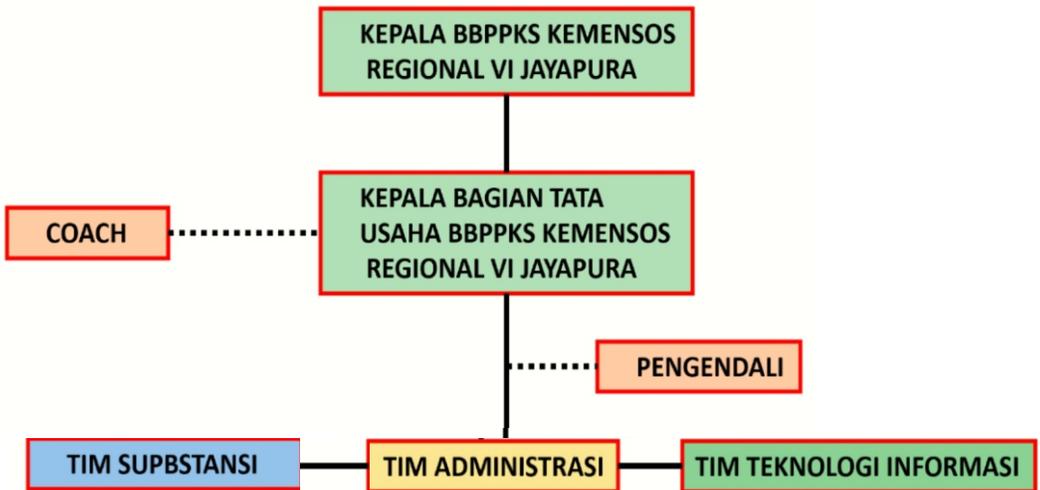
1.1 Pembentukan Tim Efektif

Sebagai tindak lanjut dari surat Kepala BPSDM Provinsi Papua Nomor 893.3/716/BPSDM tanggal 11 September 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Aktualisasi Kepemimpinan Strategis Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX LAN RI - BPSDM Provinsi Papua, demi penggerak proyek perubahan di Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura maka disusunlah Tim Efektif. Secara legal formal, Tim Efektif Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tercantum dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional VI Jayapura Nomor 1378/9.6/OT.01.00/9/2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional VI Jayapura (SK terlampir).



Gambar 7. Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

Selanjutnya struktur organisasi tim pelaksana proyek perubahan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional VI Jayapura tergambar sebagai berikut:



Gambar 8. Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI Regional VI Jayapura tentang Tim Efektif yang telah ditetapkan, maka struktur organisasi proyek perubahan terdiri atas pengarah, ketua dan anggota. Selanjutnya secara umum pembagian tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah ketua dalam hal ini Robben Rico, bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan proyek perubahan. Ketua dalam hal ini John Herman Mampioer, bertanggung jawab dalam menyusun bahan dan melaksanakan proyek perubahan, selanjutnya anggota proyek perubahan yang terdiri dari tim substansi, tim administrasi, dan tim teknologi informasi, bertanggung menyiapkan data dukung dan membantu pelaksanaan proyek perubahan.



Gambar 9. Proses Pembahasan Skema Strategi dan Timeline Rencana Proyek Perubahan

Kegiatan selanjutnya setelah ditetapkan Tim Efektif adalah pembahasan skema rancangan strategi proyek perubahan termasuk penetapan timeline dan milestone. Skema rancangan strategi proyek perubahan memuat tahapan dan kegiatan mulai dari aspek inputs, process, outputs, hingga outcomes proyek.

1.2 Penyusunan Studi Literatur dan Grand Desain terkait Proyek Perubahan

Tahapan selanjutnya setelah ditetapkan Tim Efektif dan dibahasnya skema strategi rencana proyek perubahan adalah dilakukan penyusunan studi literatur dan pembahasan grand design proyek perubahan. Kegiatan ini diimplementasikan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan yakni Minggu ke-IV September s/d Minggu ke-II November 2023. Tim Efektif melakukan pengumpulan data dan literatur kaitan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dari berbagai regulasi, jurnal nasional maupun internasional, materi rapat lintas instansi (Badan SAR, BMKG, BADAN SAR, TNI-POLRI, Lembaga Gereja, DINAS SOSIAL, DEWAN ADAT), data serta dokumen internal Kementerian Sosial terkait kebencanaan, dan berbagai literatur terkait.



Gambar 10. Pembahasan Grand Desain Rancangan Proyek Perubahan

Pembahasan mengenai grand desain proyek perubahan bertemakan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pembentukan lumbung sosial di Indonesia ditetapkan berbasis pada hasil analisis masalah dan risiko, gagasan perubahan (kondisi saat ini, yang diharapkan dan manfaat yang ingin dicapai), dan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*) terhadap rencana proyek. Draft rancangan proyek perubahan berjudul, “Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua”, selanjutnya disusun berbasis analisis masalah, risiko dan SWOT.

1.3 Penyusunan Kerangka Kebijakan Program Lumbung Sosial

Sebagai upaya memperkuat secara *legal* formal Program Lumbung Sosial, maka Tim Efektif bersama dengan *stakeholders* melakukan pembahasan dan penyusunan kerangka kebijakan yang menghasilkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kepdirjen Linjamsos) Nomor 58/3/BS.01/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, serta Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung Sosial (Penetapan Pusat dan Usulan Pemerintah Daerah) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembahasan dan penyusunan Kepdirjen Linjamsos dan SOP Penetapan Lumbung Sosial selesai diimplementasikan lebih cepat dari rencana awal yakni dilaksanakan pada Minggu ke-III Oktober s/d ke-I November 2023, hal ini dikarenakan Program Lumbung Sosial menjadi salah satu program

prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.



Gambar 11. Pembahasan Kepdirjen Linjamsos tentang Lumbung Sosial dengan *Stakeholders* Internal maupun Eksternal

Dalam pembahasan dan penyusunan Kepdirjen Linjamsos Nomor 58/3/BS.01/10/2023, Tim Efektif membangun koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* baik internal maupun eksternal Kementerian Sosial. Koordinasi dan kerja sama dengan internal Kementerian Sosial diantaranya dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Biro Hukum, Biro Keuangan, dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Inspektorat Jenderal. Pembahasan berkaitan dengan mekanisme pengelolaan logistik di Lumbung Sosial dan status Lumbung Sosial yang akan diatur dalam rancangan Kepdirjen tersebut.

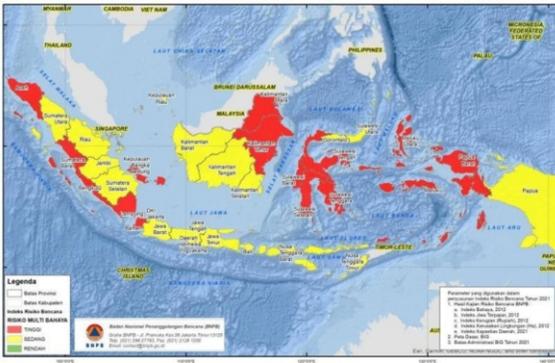


Gambar 12. Pembahasan Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung Sosial

Setelah dilakukan pembahasan Kepdirjen Linjamsos tentang Lumbung Sosial, selanjutnya dilakukan pembahasan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung Sosial (Penetapan Pusat dan Usulan Pemerintah Daerah). Dalam melaksanakan pembahasan SOP, Tim Efektif melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan *stakeholders* internal Kementerian Sosial. *Stakeholders* internal diantaranya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

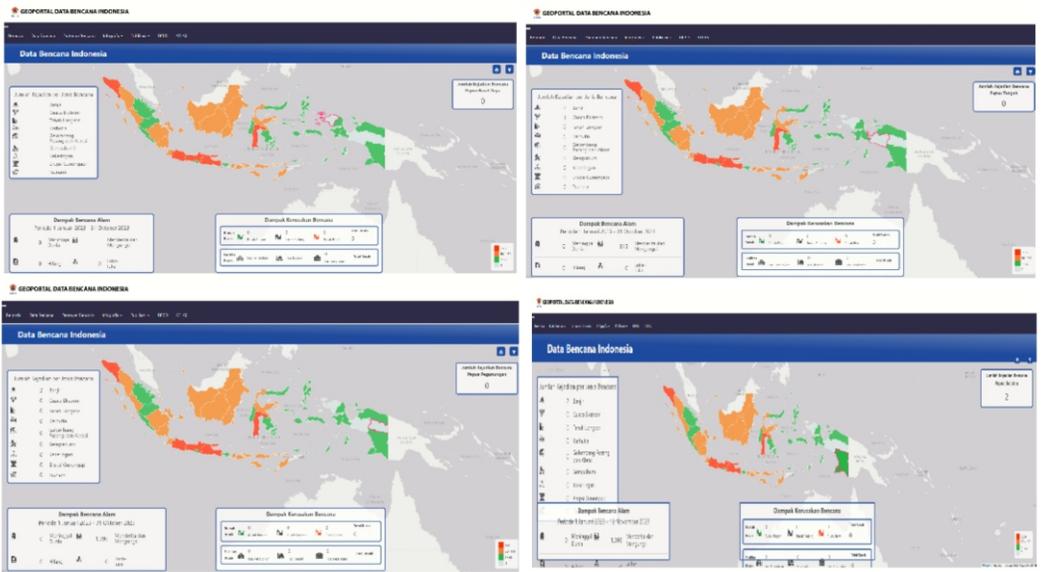
1.4 Pemetaan Calon Lokasi Lumbung Sosial

Simultan dengan kegiatan penyusunan kerangka kebijakan terkait Program Lumbung Sosial, Tim Efektif juga melakukan pemetaan calon lokasi Lumbung Sosial, hal ini sesuai dengan rencana awal yakni diimplementasikan pada Minggu ke-II s/d III Oktober 2023. Tim Efektif melakukan pemetaan calon lokasi Lumbung Sosial berbasis data sekunder berupa Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022 oleh BNPB dan Analisis & Prediksi Curah Hujan oleh BMKG serta Data/Informasi Daerah Rawan Bencana Sosial di Tanah Papua. Calon lokasi Lumbung Sosial merupakan lokasi atau kawasan yang dinilai memiliki risiko tinggi bencana.



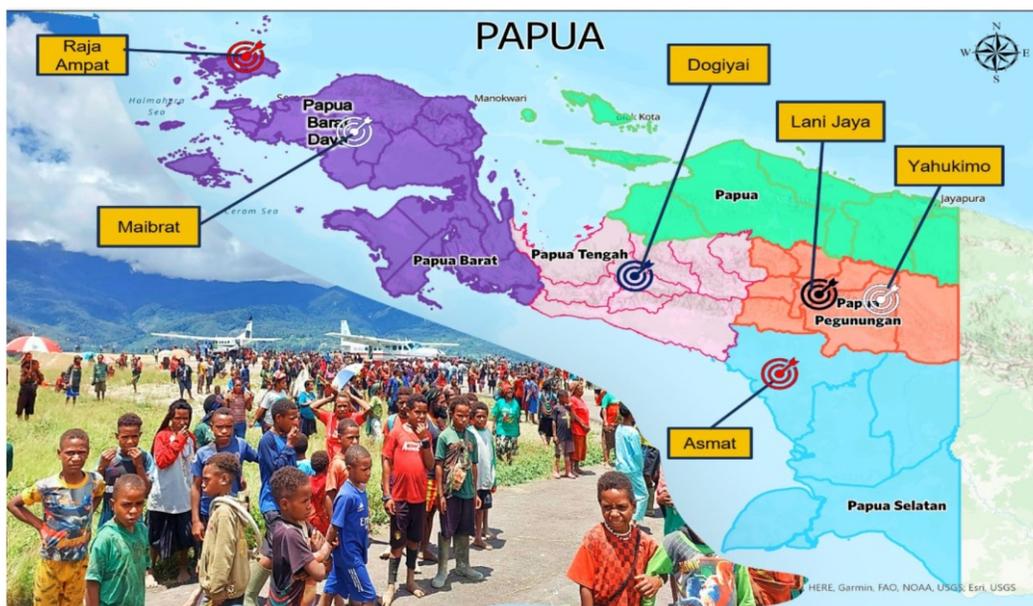
Gambar 13. Data IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG sebagai Dasar Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana Nasional Tahun 2023

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memuat nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten / kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Penilaian indeks risiko bencana mempertimbangkan komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya Analisis & Prediksi Curah Hujan oleh BMKG memuat data prakiraan cuaca (musim kemarau dan hujan), prediksi kelembaban udara, dan peringatan dini curah hujan (klasifikasi awas hingga waspada). Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa sejumlah 4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua terdapat beberapa daerah kabupaten/kota memiliki indeks risiko bencana tinggi. Berikut adalah maping per provinsi DOB terkait indeks risiko bencana Tahun 2023 (Periode Januari s/d Oktober):



Gambar 14. Peta kejadian bencana alam di 4 Provinsi DOB Papua Tahun 2023

Selanjutnya analisis data terkait indeks risiko bencana Tahun 2022 dan data kejadian bencana alam tahun 2023 digunakan sebagai dasar pemetaan calon lokasi lumbung sosial. Terpetakan sejumlah 6 lumbung sosial yang akan dibentuk hingga akhir Tahun 2023 (periode Oktober s/d November 2022) di 4 provinsi Daerah Otonom Baru dan 6 kabupaten di Tanah Papua. Peta calon lokasi lumbung sosial nasional Tahun 2022 tersaji sebagai berikut:



Gambar 15. Peta Calon Lokasi Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua Tahun 2023

Tim Efektif melakukan koordinasi dan konsultasi ke BMKG dan BNPB/BPBD terkait *new initiative program* oleh Kementerian Sosial yakni Program Lumbung Sosial dan rencana pembentukan lumbung sosial di 6 titik di 4 provinsi DOB dan 6 kabupaten di Tanah Papua, berbasis data sekunder dari kedua lembaga tersebut. Koordinasi dan konsultasi oleh Tim Efektif ke BMKG dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 di Balai Besar MKG Wilayah V Papua, dan diterima oleh Kepala Balai Besar KMG Wilayah V Papua. Secara umum BBMKG merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk pertama, memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat tentang potensi bencana serta evakuasi mandiri, dan kedua, mengapresiasi kebijakan untuk membentuk lumbung sosial di berbagai daerah yang rawan bencana di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua sebagai sebuah Upaya mitigasi bencana serta dapat mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) nasional di daerah.



Gambar 16. Koordinasi dan Konsultasi Kementerian Sosial dengan BMKG terkait Peta Calon Lokasi Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023

2. Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Menengah

Capaian proyek perubahan dalam jangka menengah tergambar pada tabel berikut:

Tabel 11. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Menengah
Periode September s/d Desember 2023

No	Tahapan dan Kegiatan	Timeline		Dokumen Pendukung
		Rencana	Implementasi	
1	Peningkatan Kapasitas Relawan Sosial dalam Manajemen Logistik dalam Lumbung Sosial	Minggu ke-III Oktober	23-24 Oktober 2023	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi (terlampir)
	1. Penyiapan materi oleh Tim Efektif;		16 Oktober 2023	
	2. Koordinasi dengan Dinas Sosial/Gereja di Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Dogiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Asmat.		18 - 20 Oktober 2023	
	3. Kegiatan peningkatan kapasitas: - Sosialisasi kebijakan terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) - Pengenalan Lumbung Sosial - Pelatihan Manajemen Logistik (Pelaporan manual).		23 - 24 Oktober 2023	
2	Membentuk Lumbung Sosial di titik pilot project	Minggu ke-II Oktober s/d Minggu ke-I November	Minggu ke-II Oktober s/d Minggu ke-II November	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi (terlampir)

<p>1. Koordinasi terkait rencana pembentukan LS</p>		<p>1. Penjajakan terkait rencana pembentukan LS 9-11 Oktober 2023 (Bukti: Surat dari Kemensos)</p>	
<p>2. Asesmen lokasi (jenis bencana, ruangan LS, dll) pembentukan LS</p>		<p>2. Koordinasi terkait penetapan LS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tiyom Lanny Jaya Oktober 2023 b. Yahukimo Oktober 2023 c. Dogiyai Oktober 2023 d. Ayamaru, Maybrat Oktober 2023 e. Waisai, Raja Ampat Oktober 2023 <p>(Bukti: Foto Rapat/ Koordinasi/Laporan)</p>	
<p>3. Pengisian bantuan logistik</p>		<p>3. Pengisian Lumbung Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tiyom Lanny Jaya Oktober 2023 b. Yahukimo Oktober 2023 c. Dogiyai Oktober 2023 d. Ayamaru, Maybrat Oktober 2023 e. Waisai, Raja Ampat Oktober 2023 <p>(Bukti: Foto Lumbung Sosial)</p>	

3	Membentuk sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial secara manual : Menyiapkan data diantaranya peta risiko bencana dan calon lokasi lumbung;	Minggu ke-III Oktober s/d II November	30 Oktober s/d 10 November 2023	Matriks pelaporan Logistik (Sheat pelaporan terlampir)
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	--

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Kegiatan dalam milestone capaian jangka menengah telah berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembentukan lumbung sosial di titik pilot project dapat selesai seminggu lebih cepat dari yang direncanakan, karena penyusunan kerangka kebijakan lumbung sosial lebih cepat 1 minggu dari jadwal yang telah direncanakan. Dukungan stakeholders dari berbagai instansi/lembaga strategis seperti 4 Pemda Provinsi DOB, Lembaga Gereja, Dewan Adat, BKMKG, TNI-POLRI dan masyarakat mempercepat proses perencanaan dan penganggaran hingga implementasi piloting program lumbung sosial. Selanjutnya urgensi kebutuhan akan tersedianya logistik yang lebih dekat dengan masyarakat terutama di titik risiko tinggi bencana, mendukung percepatan implementasi pembentukan lumbung sosial di wilayah piloting.

2.1. Peningkatan Kapasitas Relawan Sosial dalam Manajemen Logistik dalam Lumbung Sosial

Untuk memastikan manajemen logistik dalam lumbung sosial berjalan baik dan akuntable, maka Tim Efektif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi relawan sosial. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini diantaranya agar relawan sosial sebagai garda terdepan pengelolaan logistik lumbung sosial mampu: 1) memahami arah kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana saat ini, 2) memahami tata laksana program lumbung sosial serta tujuan utamanya, dan 3) memahami proses pencatatan dan tata kelola/manajemen logistik lumbung sosial.

Tahap pertama sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas relawan sosial adalah Tim Efektif menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Narasumber pertama adalah Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura selaku Project Leader proyek perubahan, yang akan menyampaikan materi terkait arah kebijakan Kementerian Sosial terkait strategi pengurangan risiko bencana (PRB) dan pengenalan *new initiative program* lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Narasumber kedua adalah Staf Balai selaku Tim IT proyek perubahan, yang akan menyampaikan materi terkait manajemen logistik dalam lumbung sosial secara manual.

Dalam pengelolaan lumbung sosial, untuk 4 Provinsi DOB saat ini masih menggunakan pencatatan secara manual dengan pertimbangan akses layanan internet di beberapa daerah yang belum terhubung dengan jaringan internet. Barang yang masuk terlebih dahulu yang akan dikeluarkan dari gudang logistik untuk penanganan bencana sesuai dengan siklus logistik bencana bahwa barang yang terlebih dahulu masuk akan lebih cepat rusak, rapuh atau kadaluarsa bagi barang-barang permakananan diantaranya lauk pauk, makanan balita dan makanan siap saji. Selanjutnya materi *expired first out* membahas mekanisme penyaluran logistik lumbung sosial yang telah memasuki masa *expire*.

Tahapan kedua setelah rancangan dan materi peningkatan kapasitas relawan sosial selesai disiapkan adalah Tim Efektif melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Dogiyai, Lanny Jaya, Yahukimo dan Asmat melalui telepon terkait rencana peningkatan kapasitas dan teknis pelaksanaannya. **Tahap ketiga** adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi relawan sosial sebagaimana gambar berikut:



Gambar 17. Peningkatan Kapasitas terhadap Relawan Sosial Perwakilan dari lokasi piloting pembentukan Lumbung Sosial

Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara manual melalui sambungan telp, dengan pertimbangan efektif waktu karena lokasi peserta yang sebagian besar berada di wilayah pesisir dan pegunungan Papua dengan akses jaringan internet yang tidak stabil. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Oktober s/d 10 November 2023, hal ini sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan sebelumnya yakni di Minggu ke-III Oktober – Minggu I November 2023. Peserta yang diundang diantaranya satu orang perwakilan dinas sosial kabupaten dan 3 orang relawan sosial perwakilan dari 6 kabupaten *piloting project* diantaranya Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Dogiyai Provinsi Papua Tengah, Lanny Jaya dan Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan, dan Asmat Provinsi Papua Selatan. Relawan sosial yang dilatih ini merupakan relawan dari unsur Tagana, pengurus gereja dan masyarakat yang nantinya akan bertanggung jawab atas manajemen logistik lumbung sosial.

2.2. Pembentukan Lumbung Sosial di Titik Pilot Project

Program Lumbung Sosial merupakan new initiative program dalam mendukung upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebagai strategi pengurangan risiko bencana. Inisiatif program ini berupaya mendekatkan logistik kepada masyarakat sehingga bantuan logistik dengan cepat dapat diakses oleh korban saat bencana terjadi karena letak gudang lumbung sosial yang telah berada ditengah-tengah mereka. Program Ini sangat mendukung perwujudan efektifitas dan efisiensi anggaran karena mengurangi biaya transportasi, distribusi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya di masa darurat.

Sebagai new initiative program, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mendukung penuh pembentukan Lumbung Sosial di wilayah-wilayah risiko tinggi bencana, khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Pada kesempatan kunjungan kerja di wilayah terdampak bencana gempa pada 21 Maret 2023 di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan kunjungan kerja pada 1 Juni 2023 di Kabupaten Asmat, Menteri Sosial menginstruksikan, ***“Saya minta kawasan yang rawan bencana bisa didirikan Lumbung Sosial, termasuk di Barat, Selatan dan daerah pegunungan Pulau Papua. Hal ini bertujuan jika akses terputus pasca terjadi bencana, maka masyarakat dapat bertahan hidup”***. Lumbung Sosial atau "buffer stock" menjadi salah satu kebijakan umum Kementerian Sosial dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak bencana.

Berbagai stakeholders eksternal diantaranya Anggota DPD RI Dapil Papua, Dr. Filep Wamafma, SH., M.H mengapresiasi adanya lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Selain memberikan kemudahan bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan saat kondisi darurat, Lumbung Sosial juga mampu memberikan respon cepat kepada masyarakat terdampak bencana. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Doberai, Paul Finsen Mayor, S.IP., CM, NNLP mendukung penuh program lumbung sosial sebagai suatu bentuk program perlindungan sosial bagi Masyarakat adat di provinsi daerah otonom baru yang lebih adaptif bagi korban bencana. Selanjutnya Uskup Keuskupan Gereja Katolik Jayapura, Mgr. Dr. Yanuarius D. Matopa Youw, Pr menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri Sosial RI atas ide pendirian lumbung sosial di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Hal ini sebagai terobosan yang dilakukan Kementerian Sosial dalam memberikan respon yang cepat salah satunya untuk ketahanan sosial masyarakat.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, berbasis hasil pemetaan daerah risiko tinggi bencana maka di tahun 2022 ini ditargetkan terbentuk sejumlah 50 lumbung sosial di 8 provinsi dan 78 kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura. Namun untuk kebutuhan proyek perubahan, ditargetkan terbentuk lumbung sosial di kabupaten/kota pada 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Mengenai penentuan 6 lokasi piloting project adalah yang merepresentasikan wilayah dengan risiko tinggi bencana dan perlu dibentuk lumbung sosial di tempat-tempat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah ini dipilih karena Raja Ampat merupakan daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) yang berbatasan dengan negara tetangga Republik Palau. Dengan letak geografis yang sulit, akses transportasi dari dan menuju Waisai, Ibu Kota kabupaten Raja Ampat hanya dapat dilakukan melalui jalur laut, itupun hanya terjadi 1 sampai 2 minggu sekali dengan menggunakan kapal perintis yang melayani warga di beberapa pulau di bagian utara, barat dan Selatan Raja Ampat. Selain itu, dengan mempertimbangkan Peta Index Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022 dan kajian BMKG, lokasi ini berada pada resiko bencana tinggi (zona merah) dan rawan bencana alam berupa gempa, gelombang tinggi dan cuaca ekstrem di barat pulau Papua. Melihat kemungkinan yang tinggi tersebut maka layaklah daerah dijadikan sebagai lokasi pembentukan lumbung sosial.

2. Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya

Lokasi ini berada di daerah kepala burung pulau Papua. Daerah ini termasuk salah satu kabupaten pemekaran Lokasi kedua proyek perubahan adalah Kabupaten Maybrat. Kabupaten ini sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Sorong. Maybrat juga merupakan daerah yang rawan gempa bumi, longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi. Selain bencana alam, Maybrat juga merupakan daerah rawan konflik sosial yang berkepanjangan dan menjadi masalah sosial serius. Dengan kondisi tersebut, lumbung sosial sebagai salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan warga masyarakat pada saat terjadinya bencana.

3. Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah

Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Dogiyai merupakan daerah yang terletak di pegunungan Tengah bagian barat Papua. Dengan

karakteristik wilayah pegunungan, daerah ini juga rawan bencana alam longsor dan gempa bumi. Selain itu, daerah ini juga sangat rawan terjadi konflik sosial, akibat budaya lokal.

4. Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan

Lanny Jaya dipilih karena letak geografis dan karakteristik wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam dan bencana sosial cukup tinggi. Cuaca ekstrim, longsor dan kekeringan menjadi kendala tersendiri. Disamping itu, daerah ini juga sangat rawan konflik sosial akibat aksi-aksi terror kelompok kriminal bersenjata (KKB). Disamping itu, biaya transportasi sangat mahal.

5. Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Lokasi ini juga dipilih dengan pertimbangan letak geografis dan karakteristik wilayah serta konektivitas jaringan transportasi dan telekomunikasi yang masih menjadi kendala utama dalam pelayanan pemerintahan. Yahukimo, juga menjadi daerah dengan curah hujan tinggi dan rawan terjadinya cuaca ekstrim, banjir dan erosi. Daerah ini juga, merupakan daerah rawan gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata di daerah pegunungan Tengah Papua.

6. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

Asmat mewakili daerah Papua Selatan, dengan wilayah dan karakteristik yang berbeda dari daerah provinsi lainnya di Indonesia. Asmat juga sangat rawan bencana banjir rob, gempa bumi, kekeringan dan rawan pangan. Dengan daerah yang hamper Sebagian besar wilayahnya rawa, maka sarana transportasi air menjadi satu-satunya sarana yang perlu disiapkan infrastrukturnya untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Implementasi pembentukan lumbung sosial telah sesuai dengan timeline yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi pembentukan lumbung dilaksanakan pada minggu ke-II Oktober hingga minggu ke-II November 2023. Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, maka pada 1 s/d 2 September 2023, Tim Efektif mulai melakukan koordinasi secara teknis dengan 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, khususnya dengan dinas sosial provinsi dan kota/kabupaten dan pihak

gereja. Koordinasi membahas terkait rencana pembentukan lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yang telah ditentukan. Penetapan lumbung sosial di 4 DOB piloting project menggunakan prosedur penetapan instruksi pusat dimana pemerintah pusat menetapkan lokasi lumbung sosial berbasis pemetaan daerah risiko tinggi bencana dilengkapi dengan usulan dari pemerintah daerah.

Tahap selanjutnya adalah Tim Efektif dibagi ke dalam 3 tim untuk melakukan asesmen lokasi pembentukan lumbung sosial dan pengisian bantuan logistik di masing-masing kabupaten piloting di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Kegiatan asesmen dilakukan melalui pertemuan *focus group discussion* antara Tim Efektif dengan perwakilan dinas sosial kabupaten/kota, BPBD kabupaten/kota, BMKG kabupaten/kota, aparat distrik dan kampung/kelurahan, Lembaga gereja, dan masyarakat. Kegiatan asesmen bertujuan untuk membahas diantaranya jenis dan karakteristik bencana di wilayah tersebut, pembentukan tim pengurus lumbung sosial, dan penetapan letak gudang lumbung sosial yang aman namun mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kegiatan asesmen lokasi pembentukan lumbung sosial oleh Tim Efektif Pertama dilaksanakan di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada * Oktober 2023. Pertemuan FGD dilaksanakan di Ruang Rapat Waiwo Setda Kabupaten Raja Ampat, hasil FGD ditetapkan bahwa gudang lumbung sosial ditempatkan di gudang logistik dinas sosial dengan pertimbangan titik gudang yang berada ditengah kota dan dekat dengan akses masyarakat sehingga mudah dijangkau, aman dari risiko banjir atau rob karena letak bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan lainnya, lumbung sosial masih dalam keadaan kosong dan siap pakai, memenuhi standar gudang penyimpanan logistik baik dari segi ukuran maupun sirkulasi udara.



Gambar 18. Kegiatan FGD dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Tim Efektif Kedua melakukan asesmen di Distrik Aymaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 8 Oktober 2023. Pertemuan koordinasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Maybrat dan pihak Gereja Klasis GKI Aymaru dilaksanakan di Aymaru, Kabupaten Maybrat. Hasil koordinasi menetapkan bahwa gudang logistik ditempatkan di ruangan kosong milik Kantor GKI Klasis Aymaru. Penentuan gudang logistik untuk lumbung sosial dengan mempertimbangkan jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini diantaranya rawan bencana alam seperti gempa, banjir dan konflik sosial sehingga ditetapkan lokasi yang jauh dari bibir Sungai dan danau sehingga aman dan bangunan relatif memenuhi standar untuk penempatan logistik baik dari sisi letaknya yang mudah dijangkau masyarakat serta sirkulasi udaranya.



Gambar 19. Kegiatan koordinasi dalam rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya

Tim Efektif Ketiga tidak bisa melakukan asesmen di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah karena alasan keamanan, dan sebagian besar aparat pemerintah daerah Dogiyai dan pengurus gereja mengungsi ke Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Sehingga Tim Efektif melakukan pertemuan koordinasi pembentukan lumbung sosial dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diantaranya Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial di ruang kerja Sekretaris Daerah. Selain itu juga, Tim Efektif melakukan koordinasi lumbung sosial dengan pihak gereja yang diwakili oleh Ketua Jemaat GKI Koinonia Monaemani Dogiyai. Pertimbangan keamanan, Tim Efektif melakukan rapat koordinasi dengan Komandan Kodim di Makodim Nabire terkait lumbung sosial di Kabupaten Dogiyai. Pertemuan koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Oktober 2023. Dari beberapa pertemuan koordinasi tersebut menetapkan bahwa gudang logistik ditempatkan di ruangan kosong di kantor gereja Jemaat GKI Koinonia Monamanie, Dogiyai. Penentuan gudang logistik untuk lumbung sosial dengan mempertimbangkan jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini diantaranya kerusuhan dan kebakaran pemukiman. Ruang yang dialihfungsikan menjadi gudang logistik ini dinilai memiliki posisi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan cukup berjarak dari pemukiman warga dan berada jadi satu dengan bangunan gereja sehingga aman dan mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran.



Gambar 20. Kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka asesmen pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah

Lambung Sosial di Provinsi Papua Pegunungan berada di Tiyom, Kabupaten Lanny Jaya. Tim Efektif melakukan pertemuan koordinasi lambung sosial langsung dengan Pj. Bupati Lanny Jaya bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan beberapa anggota DPRD Lanny Jaya di kantor Bupati pada tanggal 18 Oktober 2023. Dari pertemuan koordinasi tersebut menetapkan bahwa gudang logistik ditempatkan di ruangan kosong Sekretariat Daerah di kantor Bupati Lanny Jaya karena pertimbangan akses dan keamanan logistik.



Gambar 21. Kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka asesmen pembentukan Lambung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan

Sementara Lambung Sosial di Kabupaten Yahukimo, Tim Efektif tidak bisa melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak gereja di kabupaten Yahukimo karena alasan keamanan yang tidak terjamin saat itu, mengingat sedang terjadi penembakan dan pembunuhan warga sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah distrik di daerah yang menjadi plotting lambung sosial. Sebagai alternatif, Tim Efektif hanya melakukan koordinasi di Kantor Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura dengan perwakilan GKI Klasis Baliem Yahimo Wilayah Pelayanan Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo. Dari pertemuan koordinasi tersebut menetapkan bahwa gudang logistik ditempatkan langsung di Pos Pelayanan GKI Anggruk Yahukimo, dengan pertimbangan akses dan keamanan logistik.



Gambar 22. Kegiatan pertemuan koordinasi Tim Efektif dengan Pihak GKI Papua dalam rangka asesmen pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten Asmat menjadi daerah terakhir dalam koordinasi Tim Efektif pembentukan Lumbung Sosial di Provinsi Papua Selatan. Hasil koordinasi Tim Efektif dengan pemerintah daerah dan pihak Keuskupan Agats Gereja Katholik Asmat, menetapkan bahwa gudang logistik ditempatkan di ruangan kosong milik Keuskupan Agats. Penentuan gudang logistik untuk lumbung sosial dengan mempertimbangkan jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini diantaranya rawan bencana alam seperti banjir dan rawan pangan, sehingga ditetapkan lokasi yang jauh dari bibir sungai sehingga aman dan bangunan relatif memenuhi standar untuk penempatan logistik baik dari sisi letaknya yang mudah dijangkau masyarakat serta sirkulasi udaranya.



Gambar 23. Kegiatan koordinasi pihak Kemensos dengan Pemda Kab. Asmat dan Keuskupan Gereja Katholik Agats dalam rangka asesmen pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

Setelah asesmen awal untuk identifikasi jenis risiko bencana dan penetapan calon lokasi lumbung sosial bersama stakeholders, tahap selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengisian bantuan logistik di titik-titik gudang masing-masing kecamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kategori, jenis, jumlah, dan nilai barang logistik yang didistribusikan ke masing-masing titik adalah sama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Tabel Kategori dan Jenis Logistik pada Lumbung Sosial

No	Kategori	Jenis Logistik
1	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan Siap Saji 2. Makanan Anak 3. Lauk Pauk Beras 4. Mie Instant 5. Bahan makanan lain yang menunjang pemenuhan gizi korban bencana
2	Papan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenda Gulung 2. Tenda Keluarga 3. Tenda Serbaguna 4. Matras 5. Kasur
3	Sandang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Mandi (Family Kit) 2. Peralatan kebersihan untuk balita (Kids Ware) 3. Popok Dewasa 4. Popok Balita 5. Sarung 6. Selimut
4	Logistik lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obatan 2. Foodware (Perlengkapan Dapur Keluarga) 3. Alat Kesehatan

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Tim Efektif Pertama melaksanakan kegiatan pengisian bantuan logistik di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 18 Oktober 2023. Distribusi barang logistik menggunakan jalur udara dari Jakarta-Jayapura-Wamena dan jalur darat dari Wamena - Tiyom, Lanny Jaya. Semua barang dikirim dari Gudang Regional Pusat di Jakarta. Proses pengisian lumbung sosial melibatkan relawan sosial dan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai pengelola dan penanggung jawab barang logistik di lumbung sosial. Pembentukan lumbung sosial di Kabupaten Lanny Jaya dimuat dalam media online pembaruanpapua.com pada 18 Oktober 2023 berjudul, “Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Kemensos Bangun Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana”, pada link <https://pembaruanpapua.com/news/pemda-lanny-jaya-apresiasi-pembentukan-lumbung-sosial-di-daerahnya/>. Berikut adalah dokumentasi proses distribusi dan pengisian lumbung sosial di Kabupaten Lanny Jaya:



Gambar 24. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan

Kegiatan distribusi dan pengisian lumbung sosial di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Proses distribusi barang logistik menuju Kabupaten Yahukimo dilakukan dari Gudang Pusat yang berada di Bekasi, selanjutnya, pengiriman dilakukan melalui jalur udara dari Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Lanud Silas Papare Sentani dengan menggunakan pesawat angkut TNI AU. Selanjutnya dari Sentani menggunakan carteran pesawat kecil jenis Caravan dari Sentani menuju Distrik Anggruk, Yahukimo.



Gambar 25. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo

Proses distribusikan selanjutnya dari Pelabuhan Pomako Timika, Papua Tengah ke Pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dilaksanakan dengan terlebih dahulu bongkar-muat logistic dari cargo pesawat di Airport Mozes Kilangit Timika menuju Pelabuhan laut, dan pengiriman dilakukan dalam waktu 2 hari pelayaran. Berikut adalah dokumentasi proses distribusi dan pengisian lumbung sosial di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan



Gambar 26. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan

Tim Efektif melaksanakan distribusi dan pengisian lumbung sosial di Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2023. Pendistribusian logistik menuju Kabupaten Maybrat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni dari Tanjung Priok menuju Kota Sorong, Papua Barat Daya dan dari Sorong menuju Ayamaru, Kabupaten Maybrat melalui jalur darat. Pengiriman dari Tanjung Priok dilakukan selama 4 hari sejak koordinasi pembentukan lumbung sosial disetujui oleh Klasis GKI Ayamaru dan Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, sedangkan, pengiriman bantuan Kota Sorong menuju Distrik Ayamaru ditempuh perjalanan darat selama 5 jam.



Gambar. 27 Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya

Tim Efektif juga mendistribusikan logistik Lumbung Sosial dari Gudang Induk Papua di Kota Jayapura melalui jalur laut dengan Kapal Motor Pelni menuju Nabire yang tiba di Nabire dan kemudian dikumpulkan terlebih dahulu di Gudang Gereja GKI Koinonia Monamani Kabupaten Dogiyai, selanjutnya didistribusikan ke titik lumbung sosial yang telah disepakati sebelumnya. Adapun proses pendistribusian dari Gudang GKI Koinonia di Nabire menuju ke Lumbung Sosial di Dogiyai selama 5 jam perjalanan jalur darat menggunakan kendaraan truk.



Gambar. 28 Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Monamany, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah

Tim Efektif melaksanakan distribusi dan pengisian lumbung sosial di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 8 November 2023. Pendistribusian logistik menuju Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni dari Gudang Induk Logistik di Kota Jayapura, Papua, menggunakan Kapal Pelni selama 2 hari pelayaran menuju Kota Sorong, selanjutnya dari Sorong logistik bencana di angkut menggunakan kapal kecil menuju pelabuhan Waisai Raja Ampat. Semua barang logistik kebutuhan korban bencana di masukan di Gudang logistik di Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat. Peresmian dan penyerahan logistik Lumbung Sosial dari Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yang dipusatkan di Raja Ampat.



Gambar. 29 Pengisian Barang Logistik di Lumbung Sosial Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

3. Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Panjang

Capaian proyek perubahan dalam jangka panjang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 13. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Panjang Periode November s/d Desember 2023

No	Tahapan dan Kegiatan	Timeline		Dokumen Pendukung
		Rencana	Implementasi	
1	Perluasan 20 Lumbung Sosial di 6 provinsi di Tanah Papua 1. Penjajakan terkait penentuan calon lokasi LS; 2. Koordinasi dengan Dinas Sosial Kab/ Kota Terkait, Pemerintah Daerah	Minggu ke I -IV Oktober	November s.d Desember 2023	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi (terlampir)

	setempat (Kecamatan/ Kelurahan/Desa)			
3.	Pengisian Lumbung Sosial			
2	Implementasi sistem manajemen logistik yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center. 1. Rapat Koordinasi pengembangan sistem manajemen logistik LS 2. Pembahasan bersama Tim Efektif dan Unit Kerja terkait 3. Implementasi sistem yang terintegrasi dengan Comand Center	Minggu ke I-IV November	Minggu ke II November s/d Desember 2023	Laporan Kegiatan dan Dokumentasi, Data base LS yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center (terlampir)

Sumber : Olahan Penulis, 2023

Capaian jangka panjang pada proyek perubahan ini belum dapat dilaksanakan secara tuntas disebabkan batasan waktu pengerjaan proyek perubahan yang dilaksanakan selama dua bulan dari minggu akhir September s.d minggu ke-II November 2023. Namun demikian, pada laporan ini, dijabarkan capaian-capaian pada pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan milestone jangka panjang sebagaimana berikut:

3.1. Perluasan Lumbung Sosial di 6 Provinsi

Berdasarkan *pilot project* lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yakni di Kabupaten Raja Amapat dan Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan diketahui bahwa pelaksanaan Lumbung Sosial mendapatkan apresiasi dan dukungan dari *stakeholder* dan masyarakat di daerah-daerah tersebut, selain itu, keberadaan lumbung sosial sebagai implementasi pada kegiatan jangka pendek dan menengah memberikan percepatan penanganan bencana oleh Pemerintah. Keberadaan lumbung sosial tersebut mampu mempercepat proses penanganan bencana dalam situasi darurat sehingga perlu diperluas sebagai upaya pengurangan resiko bencana serta dampak dari kejadian bencana yang berupa

berupa konflik sosial dan citra buruk lambatnya pelayanan pemerintah bagi korban bencana. Oleh karena itu, pada pelaksanaan kegiatan jangka panjang ini, tim efektif melaksanakan perluasan pendirian lumbung sosial berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan BPBN, kajian kebencanaan oleh BMKG, dan data/informasi daerah konflik sosial di daerah. Selain itu, sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan kebijakan *bottom-up*, pendirian lumbung sosial juga memperhatikan usulan daerah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan tentang Lumbung Sosial sebagai bagian implementasi kegiatan jangka pendek. Berikut tabel 3.4 yang menggambarkan mekanisme perluasan dan target pembentukan lumbung sosial:

Tabel 14. Mekanisme Perluasan dan Target Pembentukan Lumbung Sosial

No	Mekanisme	Dasar	Target (Provinsi)	Realisasi (Provinsi)
1	Inisiatif Kementerian Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Rawan Bencana Indonesia 2. Kajian Bencana BMKG 3. Analisa dan Kajian Kementerian Sosial 4. Data/Informasi Daerah Rawan Konflik Sosial 	6	2
2	Usulan Daerah	Permohonan Usulan Pembentukan Lumbung Sosial		

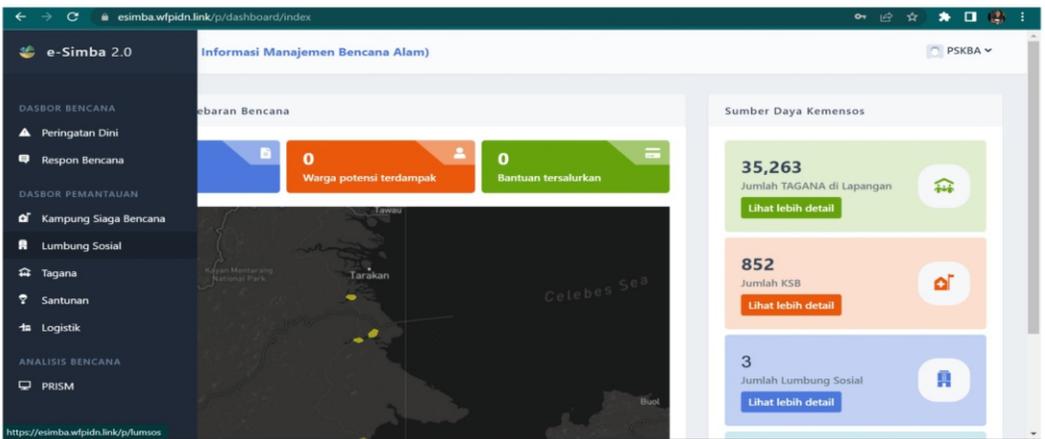
Sumber: Olahan Penulis, 2023

Tabel 14. menjelaskan target pembentukan lumbung sosial sebagai bagian implementasi jangka panjang yakni 6 provinsi dengan realisasi sebanyak 2 lokasi yang merupakan implementasi kegiatan pada jangka menengah yang telah terlaksana. Adapun mekanisme pembentukan lumbung sosial tidak hanya berupa inisiatif kementerian sosial namun juga terdapat usulan dari pemerintah daerah berdasarkan kajian kebencanaan yang ditangani oleh pemerintah daerah, hal ini berkesesuaian dengan Kepdirjen tentang Lumbung Sosial.

3.2. Implementasi Sistem Manajemen Logistik yang Terintegrasi dengan e-SIMBA dan Command Center

Lambung sosial sendiri merupakan bagian dari potensi kesejahteraan sosial yang harus terdata dan terkelola dengan baik, oleh karena itu, guna kesinambungan pembentukan lambung sosial, sistem manajemen logistik harus dapat terintegrasi dengan e-SIMBA dan Command Centre untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pada penanganan bencana alam, non-alam dan sosial yang sering terjadi.

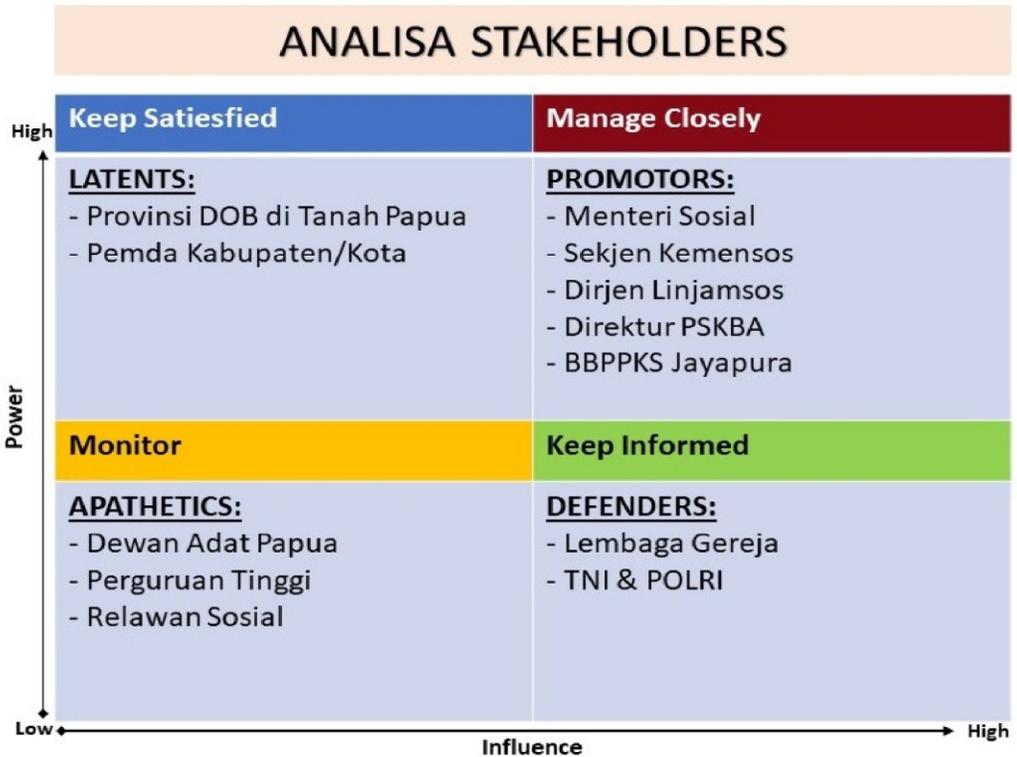
Implementasi kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan sosialisasi memasukkan data dashboard lokasi lambung sosial kedalam Sistem Manajemen Informasi Bencana Alam dan Command Center, pembahasan integrasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023. Pada pelaksanaannya, integrasi sistem ini merupakan bagian capaian proyek jangka panjang, sehingga pada rapat tim teknis menghasilkan gambaran E-SIMBA yang telah terintegrasi dengan data lambung sosial berupa Kolom Filter lokasi lambung sosial yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 30. Draft Integrasi Data Lambung Sosial ke dalam E-Simba

B. Pengelolaan Stakeholder

Pada pelaksanaan proyek perubahan ini telah dilakukan analisis stakeholder serta pengelolaan stakeholder. Stakeholder dikelompokkan berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya yaitu:



Gambar 31. Analisis Stakeholder Lumbung Sosial

Sumber : Olahan penulis, 2023

Beberapa upaya telah dilakukan agar stakeholder dapat mendukung proyek perubahan ini. Bagi stakeholder dalam kelompok promotors, dimana kelompok ini memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya), maka kelompok ini merupakan stakeholder utama. Stakeholder ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan, perencanaan, implementasi serta evaluasi proyek perubahan yang berjalan. Maka dilakukan pendekatan intensif agar stakeholder dalam kelompok ini senantiasa mendapat informasi terkait

proyek perubahan, baik terkait manfaat, perencanaan, implementasi dan pembuatan regulasi yang berhubungan dengan proyek perubahan. Serta senantiasa melibatkan stakeholder utama dalam pembuatan keputusan.

Menjalin komunikasi efektif dengan stakeholder utama merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar mereka dapat mengetahui value atau nilai-nilai yang dibangun dalam proyek perubahan ini.

Sedangkan pada Stakeholder kelompok latents, dimana stakeholder ini tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik maka yang dilakukan adalah mengupayakan agar tingkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan proyek perubahan semakin tinggi, hal ini telah diupayakan melalui komunikasi dan pemberian informasi terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan dan juga melibatkan stakeholder latens untuk turut hadir saat pembentukan Lumbung Sosial. Hal ini dimaksudkan agar stakeholder latent merasa dilibatkan dan memiliki program selayaknya mereka menjalankan program Lumbung Sosial. Pelaksana proyek perubahan juga senantiasa menunjukkan dengan mengirimkan berita atau foto dokumentasi maupun testimoni pemimpin daerah terkait dampak-dampak positif pelaksanaan Lumbung Sosial terhadap isu maupun populasi yang menjadi perhatian stakeholder latents.

Pada stakeholder defenders dimana mereka memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program, maka upaya yang dilakukan dalam mengelola stakeholder pada kuadran ini adalah mensosialisasikan program agar dampak manfaat dari program dapat diketahui bersama. Sosialisasi ini dapat berupa rapat koordinasi, rilis berita pada media sosial serta workshop yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan kelompok ini sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Terakhir adalah stakeholder apathetics, dimana stakeholder pada kelompok ini kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan. Upaya mengelola stakeholder pada kelompok ini adalah dengan memberikan informasi secara umum tanpa membutuhkan komunikasi intens untuk membangun keterikatan.

Dengan mengelola stakeholder yang telah dilakukan pelaksanaan program, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan antara lain:

1. Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan implementasi program.
2. Mendapat gambaran lebih jelas tentang konteks komunitas, potensi risiko, kesulitan, dan aset yang ada.
3. Meningkatkan Sense of ownership terhadap program Lumbung Sosial.
4. Meminimalisir penolakan terhadap program / proyek perubahan.
5. Meningkatkan peluang keberhasilan program / proyek perubahan.

C. Rencana dan Implementasi Strategi Marketing

Kepemimpinan partisipatif (*participatory leadership*) di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex dan Ambiguous*) dalam disrupsi digital yang dinamis seperti saat ini menempati posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya *strategic partnership* merupakan strategi marketing yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan ini. *Strategic partnership* diimplementasikan dengan melakukan kolaborasi yang erat dengan stakeholders. Strategi marketing akan digunakan diantaranya pada proses penyusunan proyek perubahan dan hasil proyek perubahan, sebagai berikut:

1. Strategi Mempengaruhi Stakeholder

Seorang project leader harus dapat mengajak seluruh stakeholder, baik internal dan eksternal, untuk dapat mendukung keberhasilan kegiatan proyek perubahannya. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mempersuasi para stakeholder menjadi sangat penting karena informasi harus tersampaikan dengan baik agar stakeholder mampu memahami arah gerak dan tujuan serta sasaran proyek perubahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk mengajak seluruh stakeholder dapat memberikan dukungan kepada proyek ini maka diperlukan beberapa strategi, yaitu antara lain :

Faktor utama pendukung tercapainya proyek perubahan ini adalah adanya dukungan yang baik dari Tim Efektif, serta komunikasi, koordinasi serta mampu mendinamisasi antara Project Leader dan Tim Efektif, sehingga tim efektif selaku supporting sistem dan pelaksana di lapangan harus mampu memahami pesan dan informasi yang disampaikannya pemimpinnya.

sehingga dalam pelaksanaan terjadi dinamisasi antara keinginan leader dan implementasi lapangan oleh Tim Efektif.

Selain itu, dukungan dari pihak eksternal juga tak kalah penting dalam mendukung ide/ gagasan yang ditawarkan terkait perubahan/ inovasi apa yang akan diusung, seberapa besar manfaatnya bagi publik dan seberapa tinggi urgensinya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintahan

2. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan

Dalam penerapan strategi marketing, seorang project leader harus mengenali dan memahami customer. Customer adalah adalah target dan fokus dalam marketing. Untuk itu customer harus dikenali, dipahami, dan dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Di sektor publik, customer yang terpenuhi kebutuhan atau keinginannya akan meningkatkan penggunaan atau kepatuhan dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan trust masyarakat sebagai customer terhadap instansi pemerintah.

Customer dari proyek perubahan lumbung sosial ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, relawan sosial, Kementerian/ Lembaga terkait, Dinas Sosial Provinsi/ Kab/ Kota, aparaturnya daerah (Kecamatan/Kelurahan/Desa). Oleh karenanya penting bagi project leader memahami komprehensif customernya dalam rangka menyusun strategi pemasaran marketing mix yakni melalui desain produk, pengaturan harga, melakukan distribusi, hingga promosi.

A. Mendesain Produk (Product)

Produk suatu organisasi bisa berwujud (tangible) dan bisa juga tidak berwujud (intangible) karena definisi produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam hal ini produk yang ditawarkan kepada publik adalah Program Lumbung Sosial, Kepdirjen terkait Lumbung Sosial dan Manual pencatatan Logistik bencana yang dipadukan dengan Dashboar e-SIMBA.

1. Program Lumbung Sosial

Lumbung Sosial yaitu upaya pengurangan risiko bencana dengan menyediakan sebuah media/ tempat penyimpanan logistik bagi korban bencana. Keunggulan dari produk ini menawarkan kemudahan akses bagi

penyintas/ korban bencana dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya saat terjadi bencana.

Lokasi lumbung sosial berada di tengah-tengah masyarakat sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat dengan segera mendapatkan bantuan logistic pemenuhan kebutuhan dasar tanpa khawatir kendala akses transportasi dan kondisi geografis.

Untuk mengelola Lumbung Sosial didukung SDM yang kompeten. SDM pengelola lumbung sosial merupakan sumber daya manusia terlatih dan mempunyai skill khusus dalam manajemen logistik bencana, berasal dari unsur masyarakat setempat baik dari aparaturnya daerah (distrik/kelurahan/kampung) dan masyarakat pada umumnya

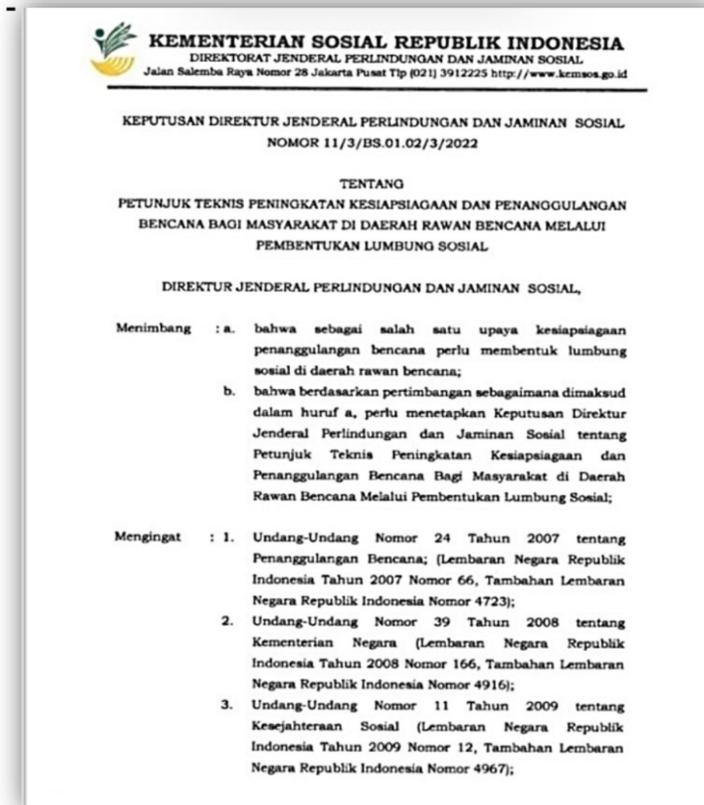


Gambar 32. Lumbung Sosial di Distrik Agats
Kab. Asmat Provinsi Papua Selatan

2. Kepdirjen Tentang Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua

Lumbung sosial didukung dengan payung hukum dan regulasi yang jelas, sehingga pelaksanaannya secara aspek legal formal sudah dijamin. Untuk memenuhi aspek legalitas hukum maka disusunlah Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 58/3/BS.01/11/2023 tentang Petunjuk Teknis

Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial.

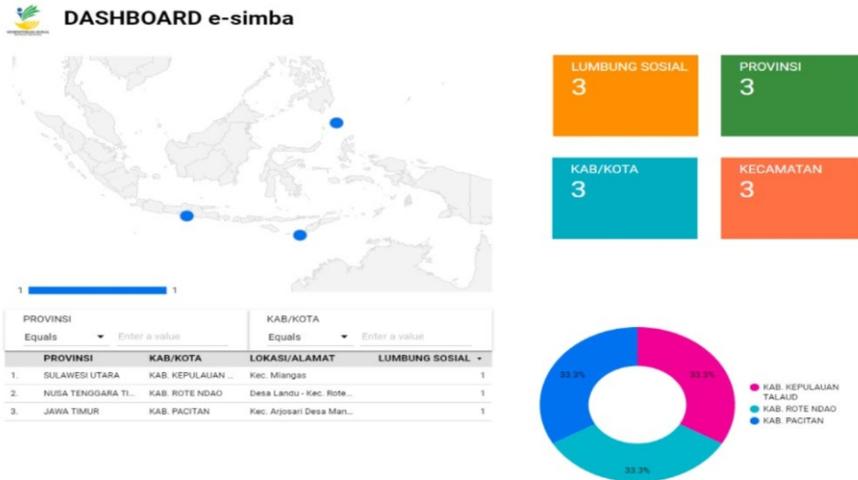


Gambar 33. Dokumen Kepdirjen LJS

3. Pencatatan Manual dan Dashboard e-SIMBA

Untuk memudahkan pencatatan dan tata kelola logistik lumbung sosial maka disusunlah model pelaporan logistic secara manual untuk kebutuhan daerah di kabupaten/kota di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Selanjutnya laporan manual tersebut akan dipadukan oleh petugas pengelola logistic di Gudang induk Balai Besar Jayapura untuk dipadukan kedalam Dashboard e-SIMBA.

Dashboard merupakan media pelaporan dan gambaran singkat mengenai program lumbung sosial, yang terdiri dari sebaran daerah provinsi/kabupaten/kecamatan yang sudah dibentuk lumbung sosial dan jumlah lumbung sosial yang ada di daerah tersebut.



Gambar 34. Dashboard e-SIMBA

B. Menetapkan Harga (Price)

Harga (price) adalah nilai (value) yang dipertukarkan untuk mendapatkan suatu produk. Dalam arti paling sempit harga adalah sejumlah uang yang dikenakan untuk suatu produk barang atau suatu layanan, dan secara lebih luas harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan oleh konsumen dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau layanan.

Produk marketing di sektor publik tidak selalu berbentuk uang namun segala bentuk pengorbanan dari customer untuk mendapatkan produk dari instansi pemerintah. Pengorbanan ini bisa juga berbentuk waktu, kesempatan, usaha, bahkan emosi.

Oleh karena itu, harga yang sebenarnya (real price) yang harus dibayar customer juga termasuk hal-hal yang bersifat

non-moneter misalnya waktu, usaha (effort), risiko psikologis.

Dalam Proyek perubahan ini Price ditekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat. Value yang di dapat dari proyek perubahan ini adalah efisiensi biaya distribusi dan waktu respon yang cepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Pelibatan SDM Relawan Sosial yang relative sudah tersebar di masyarakat lokal.

Untuk pengisian logistik lumbung sosial anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 300.00.000,- untuk pembelian pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanan, peralatan dan perlengkapan penanganan bencana. Pos anggaran berasal dari anggaran BBPPKS Jayapura dengan akun belanja barang bantuan sosial sesuai dengan DIPA BBPPKS Jayapura Nomor: SP DIPA-027.01.2.690555/2023. Harga ini lebih murah jika dibandingkan dengan pengiriman logistik ke lokasi pada saat terjadi bencana, karena keterbatasan akses dan barang maka dipastikan barang akan menjadi lebih mahal dibanding situasi normal. Ini merupakan keuntungan ekonomis yang didapatkan jika dibentuk lumbung sosial di daerah-daerah rawan bencana, yang mendekatkan logistik bencana dengan masyarakat terdampak.



Gambar 35. Pengiriman Logistik ke Lumbung Sosial lebih murah secara cost dibanding pembelian/ pengiriman saat terjadi bencana

C. Mengatur Distribusi (Place)

Suatu produk akan diakses oleh customer pada suatu posisi atau titik tertentu. Jika produk berupa barang berwujud maka customer akan mendapatkannya pada lokasi tertentu. Namun saat ini banyak juga produk yang bersifat intangible, misalnya layanan dengan aplikasi. Pada produk yang demikian pertimbangan place tetap harus diperhatikan namun dalam bentuk bagaimana agar layanan aplikasi tersebut dapat diakses dengan semudah mungkin.

Akses yang nyaman (convenience access) adalah salah satu pertimbangan terpenting pada saat memperhitungkan berbagai alternatif baik langsung maupun tidak langsung. Persepsi tentang kenyamanan memiliki banyak jenis, bisa terkait dengan lokasi, hari atau jam pelayanan, pilihan cara pembelian (misalnya secara online), dan pilihan cara pengiriman (misalnya overnight). Oleh karena itu tidak hanya dimensi dimana namun kapan dan bagaimana harus menjadi pertimbangan cermat.

Agar customer mudah mengakses produk, Proyek Perubahan ini berupaya mendekatkan lokasi logistik kepada lokasi masyarakat di daerah rawan bencana, sebagai pilot project di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yaitu Kab. Raja Ampat di Papua Barat Daya, Kab. Lanny Jaya di Papua Pegunungan, Kab. Dogiyai di Papua Tengah dan Kab. Asmat di Papua Selatan dan selanjutnya akan dilakukan perluasan di 4 Provinsi lainnya di Tanah Papua dengan wilayah indeks risiko tinggi bencana.



Gambar 36. Logistik lumbung sosial di Ágats, Kab.Asmat, Provinsi Papua Selatan

D. Melakukan Promosi (Promotion)

Sebagai sebuah produk yang akan ditampilkan di ranah publik, Lumbung Sosial membutuhkan strategi pemasaran melalui promosi untuk mengenalkan produk kepada publik secara luas. Oleh karena itu dibutuhkan pengenalan merk (branding) agar Lumbung Sosial ini bisa melekat kuat di benak masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menciptakan logo yang menarik yang memberikan kesan dan pesan yang kuat dan mendalam. Hal ini penting dilakukan karena sebuah logo akan mampu mencerminkan identitas, budaya, nilai-nilai dari suatu lembaga/institusi/organisasi agar dapat lebih dikenal oleh banyak orang.



Gambar 37. Logo Lumbung Sosial

Makna Filosofis Logo Lumbung Sosial

1. Bangunan : Menunjukkan bahwa Lumbung Sosial didirikan di bangunan yang sudah berdiri, bangunan ini juga bermakna sebagai tempat menyimpan logistik dan tempat berlindung bagi masyarakat.
2. Tameng/perisai : sebagai simbol ketahanan dalam menghadapi bencana apapun, diharapkan Lumbung Sosial tetap tangguh dalam upaya penanggulangan bencana.
3. Segitiga Oranye : sebagai simbol penanggulangan bencana oleh Kementerian Sosial, segitiga juga berarti bahwa dalam penanggulangan bencana ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

4. Inisial “LS” : sebagai identitas. Ditempatkan dibawah segitiga oranye untuk menunjukkan Lumbung Sosial sebagai penyangga dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Berwarna biru kehijauan sebagai simbol suasana tenang, ditujukan agar Lumbung Sosial bisa memberi ketenangan atas ketakutan masyarakat dalam menghadapi bencana.
5. Warna Kuning : mengusung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh, andal, dinamis dan dapat dipercaya dengan nilai – nilai kemanusiaan yang mendasarinya sebagai Kementerian yang profesional.
6. Warna Hijau : mengandung arti sehat, alami, keberuntungan dan pembaharuan, menggambarkan evolusi pembaharuan kepada kemajuan yang progresif kearah yang lebih baik, selain itu mendefinisikan kesungguhan hati nurani dalam berkomitmen.
7. Warna Biru : bermakna secara filosofis kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan keteraturan. Melambangkan sifat kepercayaan, kehandalan dan bertanggung jawab sebagai citra baru dari Kementerian Sosial RI di masa mendatang.
8. Tulisan “**LUMBUNG SOSIAL**” : mempertegas identitas, menggunakan font Cambria untuk menimbulkan kesan elegan, klasik, anggun dan inklusif.

Sebagai *new initiative program*, Lumbung Sosial telah mendapatkan dukungan penuh dari berbagai stakeholder diantaranya dari Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Filep Wamafma menyatakan mendukung penuh adanya lumbung sosial. Selain memberikan kemudahan bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan saat kondisi darurat, Lumbung Sosial juga mampu memberikan respon cepat kepada masyarakat terdampak bencana. Sebagai implementasi strategi promosi, dukungan Pj. Gubernur Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua telah dimuat dalam media online <https://potretpapua.com/gubernur-papua-barat-daya-sambut-baik-dan-apresiasi-pembentukan-lumbung-sosial-di-raja-ampat-dan-maybrat/> pada 14 Oktober 2023 berjudul,

“Gubernur Papua Barat Daya Sabmbut Baik dan Apresiasi Pembentukan Lumbung Sosial di Raja Ampat dan Maybrat”. Komandan Komando Resort Militer 172/PWY Kodam XVII Cenderawasih, Brigjen Inf Dedi Hardono menegaskan bahwa SIP, juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh program lumbung sosial sebagai suatu bentuk program perlindungan sosial yang lebih adaptif bagi korban bencana dan telah dipublikasi dalam media online <https://pembaruanpapua.com/news/danrem-172-pwy-bencana-tidak-bisa-diprediksi-lumbung-sosial-salah-satu-solusi-percepat-bantuan/>. Selain itu, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Mananwir Paul Vinsen Mayor juga menyatakan bahwa dengan adanya pusat-pusat logistik di daerah berupa lumbung sosial yang digagas oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Regional VI Jayapura merupakan respon yang cepat dan sebagai Langkah strategis perlindungan dan jaminan sosial bagi Masyarakat adat di Tanah papua salah satunya untuk ketahanan sosial masyarakat. Berbagai dukungan yang mengalir terutama dari tokoh-tokoh yang strategis dan pengambil kebijakan ini telah mendorong upaya promosi yang lebih kuat dan massif kepada publik. Salah satu bentuk promosi peluncuran Lumbung Sosial di Kab. Raja Ampat sebagai salah satu perwakilan lokasi pilot project Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua juga dipublish pada media TVRI berita lokal dan nasional <https://www.youtube.com/live/KH1vz8JLAXM?si=Z9aYMuMHTWf5pwew>

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

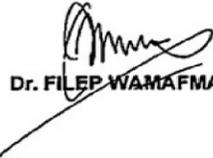
Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum

Jabatan : Anggota DPD RI

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioper, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jakarta, 27 Oktober 2023


Dr. FILEP WAMAFMA, SH., M.Hum

Gambar 38. Dukungan Anggota DPD RI terhadap Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua

Secara umum, strategi pemasaran melalui marketing mix (bauran pemasaran) dapat digambarkan sesuai Tabel 15 seperti berikut.

Tabel 15. Rencana Strategi Marketing

No.	Strategi Marketing	Elemen Pemasaran dalam Lumbung Sosial
1.	Product	<ul style="list-style-type: none"> - Produk yang dihasilkan yaitu Lumbung Sosial, yaitu upaya pengurangan risiko bencana dengan menyediakan sebuah media/ tempat penyimpanan logistic bagi korban bencana. Keunggulan dari produk ini menawarkan kemudahan akses bagi penyintas/ korban bencana dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya saat terjadi bencana. - Lumbung sosial didukung dengan payung hukum dan regulasi yang jelas, sehingga pelaksanaannya secara aspek legal formal sudah dijamin. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 11/3/BS.01.02/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial - Manual pencatatan dan Dashboard e-simba, merupakan aplikasi pencatatan dan tata kelola logistik lumbung sosial yang disajikan secara riil time, berdasarkan lokasi titik lumbung sosial.

2.	Price	<p>Price ditekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas dari proyek perubahan ini, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat. Value yang di dapat dari proyek perubahan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi biaya distribusi dan waktu respon yang cepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistic dan kebutuhan dasar korban bencana. - Pelibatan SDM Relawan Sosial lokal yang relative sudah tersebar di masyarakat.
3.	Place	<p>Proyek Perubahan ini mendekatkan lokasi logistik kepada lokasi masyarakat di daerah rawan bencana, sebagai pilot project yaitu Kab. Raja Ampat di Papua Barat Daya, Kab. Dogiyai di Papua Tengah, Kab. Lanny Jaya dan Kab. Yahukimo di Papua Pegunungan, dan Kab. Asmat di Papua Selatan. Selanjutnya akan diperluas di 4 Provinsi lainnya di Tanah Papua dengan resiko tinggi bencana.</p>
4.	Promotion	<p>Strategi promosi program kepada stakeholder dan publik secara luas melalui kegiatan sosialisasi melalui media elektronik, banner dan leaflet dan media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) dan media publikasi lain. Dalam hal ini, proyek perubahan ini mendapatkan banyak dukungan diantara dari K/L terkait dan DPD RI.</p>
5.	Customer	<p>Customer yang menjadi target startegi marketing adalah: Masyarakat di daerah rawan bencana, Relawan Sosial, Dinas Kab/Kota terkait, Dinas Sosial Provinsi khususnya di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua, Lembaga Gereja, Lembaga Adat, K/L dan instansi terkait.</p>

Tabel 16. Ide Inovasi

No.	Model	Kondisi Saat Ini	Inovasi Kondisi
1.	Inversi/ Pembalikan	Gudang Logistik mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana menuju lokasi yang paling dekat dan terjangkau dengan Gudang logistik. Kemudian dari gudang logistik disalurkan kepada masyarakat dengan akses yang tidak mudah saat bencana	Tersedianya Lumbung Sosial pada tingkat kecamatan/desa di daerah lokasi rawan bencana yang telah dilengkapi logistik kebutuhan dasar seperti permakanan, peralatan dan perlengkapan, sehingga masyarakat terdampak bencana terdekat dapat segera mendapatkan kebutuhan dasarnya
2.	Integrasi	Logistik diberikan sesuai dengan ketersediaan pada Gudang logistik (sandang, pangan, papan). SDM terbatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Lumbung Sosial telah dilengkapi dengan kebutuhan dasar serta sarana yang dibutuhkan dalam pendistribusian logistik, seperti alat komunikasi, penerangan, dll dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat. • Akan diintegrasikan dengan teknologi digital terkait manajemen logistik.
4.	Adisi/ Penambahan	Kebutuhan dasar yang diberikan hanya berupa sandang, pangan dan papan.	Selain kebutuhan dasar turut diberikan sarana dan prasarana bagi pengelola LS dalam rangka memudahkan koordinasi dan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat
5.	Eksagerasi/ Penekanan	Tidak ada proses pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.	Masyarakat lokal difasilitasi dan dilibatkan secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program menjadi lebih tinggi

D. Kendala Internal dan Eksternal

Secara umum seluruh proses pelaksanaan kegiatan proyek perubahan tidak mengalami kendala yang berarti yang dapat memengaruhi hasil pelaksanaan proyek perubahan, namun demikian, terdapat kendala yang bersifat internal maupun eksternal pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Hambatan Internal

Koordinasi Tim Efektif.

Kendala internal berkaitan dengan koordinasi antar tim efektif terkait pembahasan proyek perubahan, kendala ini terjadi disebabkan kondisi struktur tim yang terdiri dari berbagai unsur unit kerja, selain itu, tingginya respon kasus dalam lingkup Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura yang melibatkan unsur tim efektif baik berupa bencana alam dan bencana konflik sosial di daerah rawan gangguan keamanan di daerah pegunungan Papua dan penyaluran bansos turut andil dalam sulitnya menentukan jadwal koordinasi. Selain itu kendala konektivitas transportasi antar kabupaten/kota di Tanah Papua yang sangat terbatas karena luasnya wilayah Tanah Papua dari dataran rendah, daerah kepulauan hingga ke daerah pegunungan Papua.

2. Hambatan Eksternal

a. Akses Lokasi

Akses lokasi titik lumbung sosial menjadi salah satu kendala eksternal yang dihadapi selama masa pelaksanaan proyek perubahan. Hal ini didasari pada sulitnya transportasi, armada angkut, maupun telekomunikasi di daerah pilot project pembentukan lumbung sosial.

b. Sarana dan Prasarana Berupa Gudang

Kendala eksternal lainnya yakni berupa kendala sarana dan prasarana berupa gudang sebagai tempat penyimpanan barang-barang logistik. Hal ini mengalami kendala pada beberapa daerah disebabkan keterbatasan bangunan, luas, maupun lokasi gudang yang tidak tergolong pada lokasi rawan bencana.

c. Kebiasaan Masyarakat

Salah satu kendala dalam pendirian lumbung sosial yakni kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan barang persediaan. Pada daerah Kepulauan Miangas misalnya,

masyarakat setempat memiliki kesepakatan bersama antar tokoh masyarakat bahwa setiap barang bantuan yang ada harus dibagikan langsung kepada masyarakat, hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian lumbung sosial yang merupakan barang bantuan yang disiapsiagakan dan dimanfaatkan pada saat terjadi suatu peristiwa bencana baik berupa bencana alam maupun bencana sosial dan non-alam.

E. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala internal maupun eksternal sebagaimana dijabarkan diatas, penulis melakukan upaya sebagaimana berikut:

1. Penjadwalan Pertemuan Rutin dan Pemanfaatan Media Komunikasi

Penjadwalan pertemuan rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali yakni pada hari Jumat untuk memantau progres pelaksanaan proyek perubahan, selain hal tersebut, pemanfaatan media komunikasi online berupa *zoom meeting* dan WAG Proyek Perubahan menjadi sarana dalam memperkuat koordinasi antar Tim Efektif yang telah dibentuk.

2. Penetapan Penggunaan Anggaran

Penetapan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasar pada *output* capaian Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura sehingga pada proyek perubahan lumbung sosial dapat dilaksanakan dengan menekankan aspek pengurangan resiko bencana berupa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

3. Penguatan Koordinasi untuk Mengatasi Akses Lokasi dan Sarana Prasarana Pembentukan Lumbung Sosial

Penguatan koordinasi antara pelaksanaan perubahan dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya menjadi upaya untuk mengatasi kendala terkait akses lokasi dan ketersediaan sarana prasarana tempat penyimpanan barang persediaan logistik bencana. Penguatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yakni pemerintah daerah di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, BNPB/BPBD, BMKG serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan transportasi pengiriman logistik ke daerah-daerah yang sulit akses.

4. Memahami Kearifan Lokal untuk Mengatasi Kendala Kebiasaan Masyarakat

Memahami kearifan lokal menjadi salah satu bagian yang dilaksanakan selama proyek perubahan ini. Anggapan bahwa bantuan sosial harus dapat segera disalurkan bertentangan dengan pemanfaatan barang persediaan pada lumbung sosial. Untuk dapat memahami kearifan lokal, petugas pembentukan lumbung terlebih dahulu memetakan *stakeholder* dilokasi pembentukan lumbung serta melaksanakan pendekatan persuasif dengan mengetahui kebutuhan serta aktifitas keseharian masyarakat sekitar sehingga pelaksanaan lumbung sosial dapat sesuai dengan yang diharapkan.

F. Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan

Kegiatan ini dilakukan oleh tim efektif untuk melihat pengelolaan logistik dan pemanfaatan lumbung sosial di 6 (enam) titik pembentukan lumbung sosial. Pada pelaksanaannya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tiga cara yakni dengan peninjauan langsung, dalam jaringan, serta melihat progres penggunaan dashboard e-Simba Lumbung Sosial. Peninjauan langsung dilaksanakan setelah tim pelaksana perubahan melakukan pembentukan lumbung sosial, sementara itu, pelaksanaan secara daring menggunakan media online, adapun terkait dengan penggunaan dashboard monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka oleh tim efektif.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan lumbung sosial. Data lapangan yang telah dikumpulkan, dianalisis dan kemudian disimpulkan serta dibuat rekomendasi dalam bentuk laporan (perlu laporan guys). Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama seluruh tim proyek perubahan yang terlibat. Adapun gambaran hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyaluran Bantuan Bencana dilaksanakan secara tepat waktu (*golden time*)

Pemanfaatan lumbung sosial ditiga titik dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan adanya percepatan penyaluran bantuan logistik pada korban bencana yang terjadi di wilayah pembentukan lumbung sosial. Pada Kepulauan Miangas, barang bantuan seperti Makanan Siap Saji dilaksanakan pada masa-masa paceklik, berdasar laporan Dinas Sosial Kabupaten Talaud terjadi

keterlambatan armada Kapal Sabuk Nusantara (Perintis) yang menyebabkan terputusnya rantai pasok, sehingga berdasarkan laporan tertulis Dinas Sosial kabupaten Raja Amapat dilaksanakan penyaluran Makanan Siap Saji. Sementara itu, di Kabupaten Maybrat, penyaluran bantuan dari Lumbung Sosial dimanfaatkan untuk memberikan bantuan pada korban kebakaran sehingga kebutuhan permakanan dan sandangnya dapat terpenuhi dalam waktu 1x24 jam.

2. Perlunya peningkatan pemahaman pengelolaan dan pencatatan logistik

Dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan diketahui perlunya pengelolaan dan pencatatan logistik yang lebih baik dengan penunjukan pengelola logistik pada lumbung sosial yang dapat terdiri dari unsur pemerintah desa, kecamatan maupun masyarakat untuk memberikan tanggung jawab pada pengelolaan logistik baik berupa catatan keluar dan masuk barang logistik. Selain hal tersebut, pengaturan luas penyimpanan barang logistik perlu diatur dan ditata untuk memudahkan pemanfaatan lumbung sosial.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek perubahan dengan tema “*Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023*” telah dilaksanakan dengan baik tanpa mendapatkan kendala yang berarti dan melahirkan inovasi dalam kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat melalui pembentukan Lumbung Sosial sehingga masyarakat di lokasi rawan bencana memiliki kemudahan akses dalam mendapatkan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Dengan mendekatkan logistik bencana di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasarnya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya faktor transportasi dalam hal penyaluran logistik dari gudang pusat menuju ke gudang regional sampai seterusnya hingga ke tangan customer (masyarakat). Inovasi pembentukan lumbung sosial juga mengubah paradigma lama yaitu masyarakat yang hanya menunggu bantuan, uluran tangan dari pemerintah bergeser kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana atau lebih dikenal dengan *Community Based Disaster Management*. Proyek perubahan telah menghasilkan beberapa inovasi antara lain :

1. Tersusunnya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 11/3/BS.01/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.
2. Tersusunnya SOP Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua.
3. Terwujudnya Ujicoba kegiatan Pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Lanny Jaya, Yahukimo, Dogiyai dan Asmat di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua.

4. Terbangunnya sistem pencatatan dan pengelolaan logistik Lumbung Sosial secara manual di daerah titik lumbung sosial, dan seterusnya data tersebut akan dipadankan melalui aplikasi *realtime* di Gudang Induk Balai Jayapura.
5. Terjadinya pergeseran paradigma dari masyarakat yang hanya menunggu bantuan dan uluran tangan pemerintah, menjadi *Community Based Disaster Management*.

B. Saran dan Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi atas pelaksanaan Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, antara lain:

1. Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam akan pentingnya fungsi lumbung sosial dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, dimana saat dibutuhkan logistik sudah tersedia sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam hal pendistribusian kepada penyintas/ masyarakat terdampak bencana.
2. Perlunya pemahaman yang mendalam bagi para petugas logistik di lumbung sosial agar logistik dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk didalamnya dalam hal menghindari risiko barang logistik tidak terpakai karena masuk masa kadaluarsa maka diberikan kewenangan bagi pengurus lumbung sosial untuk dapat mempergunakannya pada event-event kesiapsiagaan dan mitigasi bencana maupun kegiatan sosial lainnya.
3. Sosialisasi dan pelatihan dengan materi yang komprehensif agar pengurus lumbung maupun petugas pencatatan gudang logistik tahu persis mekanisme pencatatan yang sesuai sehingga tidak terjadi kekosongan logistik dalam kurun yang lama. Jika sistem ini sudah terbangun maka proses pengisian lumbung sosial akan lebih mudah karena dilakukan monitoring secara berkala secara berjenjang dan pelaporan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyusun perencanaan anggaran yang sesuai dengan peta lokasi daerah rawan bencana sehingga bisa dilakukan perluasan pembentukan lumbung di titik strategis dan kritis di daerah rawan bencana.

5. Optimalisasi pengembangan sistem pencatatan dan manajemen lumbung sosial dengan mengintegrasikan dengan sistem pencatatan logistik bencana serta *command center* sebagai upaya akselerasi dalam pengurangan risiko bencana by sistem digital yang didukung oleh infrastruktur jaringan internet di daerah.

C. Lesson Learned

Mengacu pada pelaksanaan proyek perubahan dalam membangun kesiapsiagaan dan Mitigasi Masyarakat melalui di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua dapat dipetik beberapa pelajaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Peta Lokasi Rawan Bencana dinyatakan bahwa kondisi seluruh wilayah Indonesia, khususnya 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, merupakan daerah yang memiliki potensi bencana tinggi dan sedang sehingga harus ada komitmen setiap pemangku kepentingan (stakeholder) diantaranya pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, relawan dan masyarakat, untuk bersama-sama membangun kesadaran dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang timbul yaitu dengan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
2. Pentingnya kegiatan edukasi melalui sosialisasi yang masif terkait pembangunan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan memiliki standard atau pola/modul yang sama yang dilakukan secara holistik dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
3. Pentingnya monitoring dan tindak lanjut terhadap kondisi lumbung sosial sehingga logistik memadai jika terjadi bencana atau keadaan kahar.
4. Pembangunan sistem manajemen logistik secara holistik dan terintegrasi dengan aplikasi strategis terkait.
5. Upaya pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan pada pemerintah pusat/daerah saja tetapi harus ada partisipasi aktif masyarakat terhadap kondisi lingkungannya dengan, bisa dengan cost sharing atau dukungan lainnya dalam peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

6. Selama proses perencanaan sampai dengan implementasi proyek perubahan ini terdapat beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan implementasi proyek perubahan sampai dengan penulisan laporannya, yang sangat signifikan salah satunya adalah peran kepemimpinan yang dikomandoi oleh Pelaksana Proyek Perubahan. Dimana *project leader* berupaya menerapkan kepemimpinan strategis yang dapat meningkatkan *performance* organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama, yaitu mendekatkan kebutuhan dasar kepada masyarakat di daerah rawan bencana. *Project leader* menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, yang bersifat demokratis, egaliter dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini terlihat dari gaya diskusi *project leader* dengan tim efektif dan memberi kesempatan pelibatan pegawai yang masuk dalam timnya. Serta menerapkan gaya kepemimpinan kewirausahaan dimana *project leader* peka terhadap perubahan dan mampu merespon dan memanfaatkannya sebagai peluang misalnya adanya kendala akses transportasi pada daerah terluar dan tertinggal yang rawan bencana dilihat sebagai tantangan dan mencoba berinovasi dengan program yang lebih pro rakyat. *Project leader* juga berinisiatif menggabungkan teknologi informasi melalui aplikasi *realtime* yang mampu mendukung pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha.

Kesemua pengalaman ini tentu sangat bermanfaat dalam membangun organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta melakukan modifikasi perilakunya sejalan dengan pengetahuan dan wawasan yang diduplikasinya sehingga mampu mencapai tujuan organisasi dengan lebih optimal dan memberikan yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2020*). *Indeks risiko bencana indonesia (irbi)*. Jakarta: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2021). *Indeks risiko bencana indonesia (irbi)*. Jakarta: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2022). *Bencana indonesia 2022*. gis.bnpb.go.id diakses 23 September 2022.
- BPS Provinsi Papua. (2022). *Provinsi Papua dalam angka 2022*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- BPS Provinsi Papua Barat. (2022). *Provinsi Papua barat dalam Angka 2022*. Jayapura: BPS Provinsi Papua Barat.
- BPS Kabupaten Raja Ampat. (2022). *Kabupaten Raja Ampat dalam angka 2022*. Waisai: BPS Kabupaten Raja Ampat.
- Dally, Dadang. (2015). Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Agenda Membangun Tim Efektif. LAN RI
- Djalante, R., & Garschagen, M. (2017). A review of disaster trend and disaster risk governance in Indonesia: 1900–2015. In *Disaster Risk Reduction in Indonesia* (pp. 21-56). Springer, Cham.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017*. Jakarta: Pusat Studi Gempa Nasional.

Metrotvnews.com. (2021). Pengungsi gempa majene berebut bantuan. [Pengungsi Gempa Majene Berebut Bantuan - metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com) diakses 20 Juli 2022.

Mustajab, Ridwan. (2023). *Kerugian Bencana Alam Mencapai Rp. 1,06 Triliun pada 2022*. Data Indonesia.id 0 <https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-akibat-bencana-alam-mencapai-rp106-triliun-pada-2022> diakses 20 Oktober 2023.

Sulubere, Muhammad Belanawane. (2015). *Kampung siaga bencana sebagai instrumen kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di Indonesia: politik pembangunan dan partisipasi dalam diskursus pembangunan kebencanaan*. Sosio Konsepsia Vol 5, No 01, September-Desember 2015.

Twigg, John. (2004). *Good practice review: disaster risk reduction mitigation and preparedness in development and emergency programming*. United Kingdom: HPN.

UNESCAP. (2021). *Resilience in a riskier world: managing systematic risks from biological and other natural hazards*. Bangkok: Asia-Pacific Disaster Report 2021.

UNISDR. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030*. Geneva: UNISDR.

UNISDR. (2005). *Hyogo framework for action 2005-2015: building the resilience of nations and communities to disasters*. Kobe: UNISDR.

Utama, Abraham. (2018). *Penjarahan pasca gempa dan tsunami, bagaimana penegakan hukum di palu? .* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45721520> diakses 18 Juli 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Efektif



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(BBPPKS) JAYAPURA

Jl. Gerilyawan No. 135 Abepura Telp/Fax (0967) 581144

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA

Nomor : 1468/9.6/0T.01.00/9/2023

T E N T A N G

**TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN KEPALA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) DI JAYAPURA SEBAGAI PESERTA
PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXX
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL(BBPPKS) JAYAPURA

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka menghasilkan proyek perubahan yang bermanfaat, jelas, inovatif dan mampu memecahkan permasalahan kesejahteraan sosial;
 - Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Jayapura;
 - Bahwa dalam rangka merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan evaluasi proyek perubahan maka di pandang perlu membentuk Tim Kerja Proyek Perubahan di maksud dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Jayapura;
 - Bahwa ASN yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja di maksud;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala BBPPKS di Jayapura Tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 30 Tahun 2023.
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 221/Huk/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial Pada Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Profesi;

Lampiran 2. Notula Rapat Pemilihan Lokasi & Strategi Distribusi Logistik LS



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(BBPPKS) JAYAPURA

Jl. Gerilyawan No. 135 Abepura Telp/Fax (0967) 581144

NOTULA

Rapat : Rapat Proyek Perubahan Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua
Agenda : Pemilihan Lokasi Lumbung Sosial dan Strategi Distribusi Logistik LS di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua
Hari / Tanggal : Rabu / September 2023
Jam : 10.00 – Selesai WIT
Tempat : Ruang VIP Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura

A Rapat Dipimpin Oleh : Kepala Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura

B Undangan :

1. Kodam XVII Cendrawasih Jayapura
2. Korem 172 Biak
3. Kodim 1705 Nabire
4. Lantamal X Jayapura Papua
4. Lanud Silas Papare Jayapura
5. Polda Papua
6. Keuskupan Jayapura
7. BMKG Provinsi Papua
8. Basarnas Provinsi Papua
9. TVRI
10. Tribun Papua

C Proses Jalannya Rapat :

Secara garis besar proses jalannya rapat pertemuan adalah undangan/mitra kerja dalam mendukung Proyek Perubahan Sinergis Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua.

D Diskusi :

1. Pemilihan Lokasi dibangun Lumbung Sosial
2. Pembahasan timeline dan akses masuk ke LS di Lokasi yang telah ditetapkan

Lampiran 3. Notula Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Literatur Kaitan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Grand Desain LS



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(BBPPKS) JAYAPURA

Jl. Gerilyawan No. 135 Abepura Telp/Fax (0967) 581144

NOTULA

Rapat : Pembahasan Studi Literatur dan Grand Desain Lumbung Sosial di 4 (empat) Provinsi DOB di Tanah Papua
Agenda : 1. Pengecekan data dan literatur terkait lumbung sosial
2. Pembahasan grand desain lumbung sosial
Hari / Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : Pukul. 10.00 WIT - selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 BBPPKS Regional VI Jayapura - Papua

A Dipimpin Oleh : Kepala Balai Besar Kementerian Sosial Regional VI Jayapura

B Yang Hadir :

1. Kepala BBPPKS Jayapura
2. Tim Efektif

C. Proses Jalannya Rapat :

Proses jalannya rapat diawali arahan pembuka oleh Kepala Balai Besar Kesejahteraan Sosial regional VI Jayapura selaku Project Leader Proyek Perubahan terkait kesiapan Studi Literatur dan penyusunan grand desain lumbung sosial.

D Diskusi

1. Literatur Jurnal Online dan media literatur nasional dan internasional
2. Produk hukum terkait kebencanaan
3. Peta Index Rawan Bencana Indonesia dan Data/Informasi Konflik Sosial di Papua
4. Pembahasan grand desain LS di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua

Lampiran 4. Hasil Pembahasan dan Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal tentang Lumbung Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3912225 <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
NOMOR 02/3/BS.01.02/11/2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN LUMBUNG SOSIAL
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan cepat, tepat dan terkoordinir dalam setiap fase penanggulangan bencana serta dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi Bencana, perlu adanya pembentukan Lumbung Sosial pada daerah rawan bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Lumbung Sosial dalam Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Lumbung Sosial dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Lampiran 5. Notula Pembahasan dan penyusunan standar operasional prosedur tentang Lumbung Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3912225 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG LUMBUNG SOSIAL

A. Dasar

Undangan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, tanggal 11 Agustus 2022, Nomor 2235/3.1/OT.00.00/8/2022, Hal: Undangan Rapat.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 18 s.d. 20 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB s.d. selesai bertempat di The Green Forest Resort - Jl. Sersan Bajuri No. 102, Cihideung, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat.

C. Agenda

Pembahasan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Lumbung Sosial

D. Peserta

Absen Terlampir.

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Pembukaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan ini merupakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Lumbung Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan *fullboard* dengan melibatkan peserta 30 (Tiga puluh) orang dari kementerian sosial terdiri dari Perlindungan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Perlindungan Jaminan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBS), Jaminan Sosial, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan, dan Inspektorat Jenderal. Dan 2 (dua) orang narasumber perwakilan dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

Lampiran 8. BAST Pengisian bantuan logistik Lumbung Sosial di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya



KEMENTERIAN SOSIAL RI
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(BBPPKS) JAYAPURA
Jl. Gerilyawan No. 135 Kamkey, Alorota, Jayapura Telp. 0997 581144 Fax. 0997 581144

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN LOGISTIK

Nomor : 211/79.6/PL.03/11/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **John Herman Mampioer**
NIP : 198111162005021002
Jabatan : Kepala BBPPKS Di Jayapura
Instansi : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura
Alamat : Jl. Gerilyawan No.135 Kamkey Kel. Awyo Kec. Asepura

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**

2. Nama : **Martha M. Sanadi**
NIP : 197110191997022001
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Instansi : Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
Alamat : Kompleks Kantor Bupati – Distrik Kota Waisai

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menerangkan bahwa **Pihak Kesatu** telah menyerahkan barang bantuan logistik berupa Permakaman, Peralatan Evaluasi, Dan Perlengkapan Keluarga kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima barang tersebut dari **Pihak Kesatu** dalam keadaan baik dan lengkap, berupa:

No.	Uraian Barang	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total	Kondisi
1.	Makanan Siap Saji A2023	Paket	1000	Rp 78.945	Rp 78.945.000	Baik
2.	Makanan Anak A2023	Paket	1000	Rp 44.884	Rp 44.884.000	Baik
3.	Tenda Gulung A2023	Lembar	420	Rp 240.000	Rp 100.800.000	Baik
4.	Family Kit A2023	Paket	500	Rp 419.000	Rp 209.500.000	Baik

5.	Kasur 2023	Unit	100	Rp 425.000	Rp 42.500.000	Baik
6.	Selimut 2023	Lembar	500	Rp 93.500	Rp 46.750.000	Baik
7.	Velbed 2021	Unit	120	Rp 704.000	Rp 84.480.000	Baik
8.	Sandang Dewasa 2022	Paket	240	Rp 198.000	Rp 47.520.000	Baik
9.	Pembalut Wanita	Paket	2400	Rp 17.050	Rp 40.920.000	Baik
Total					Rp 696.299.000	

Adapun barang-barang tersebut sifatnya **barang persediaan habis pakai** dan penggunaannya untuk **Kesiapsiagaan Lumbung Sosial** di Kabupaten Raja Ampat, Kota Waisai, Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya **Pihak Kedua** harus melaksanakan penatausahaan dan menggunakan barang tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 9 November 2023

Pihak Kedua

Martha M. Sanadi
NIP. 197110191997022001



Lampiran 9. Pengenalan sistem pencatatan dan tata kelola logistik Lumbung Sosial berbasis digital

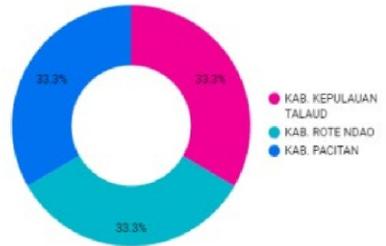
SCREENSHOOT DASHBOARD E-SIMBA



DASHBOARD e-simba

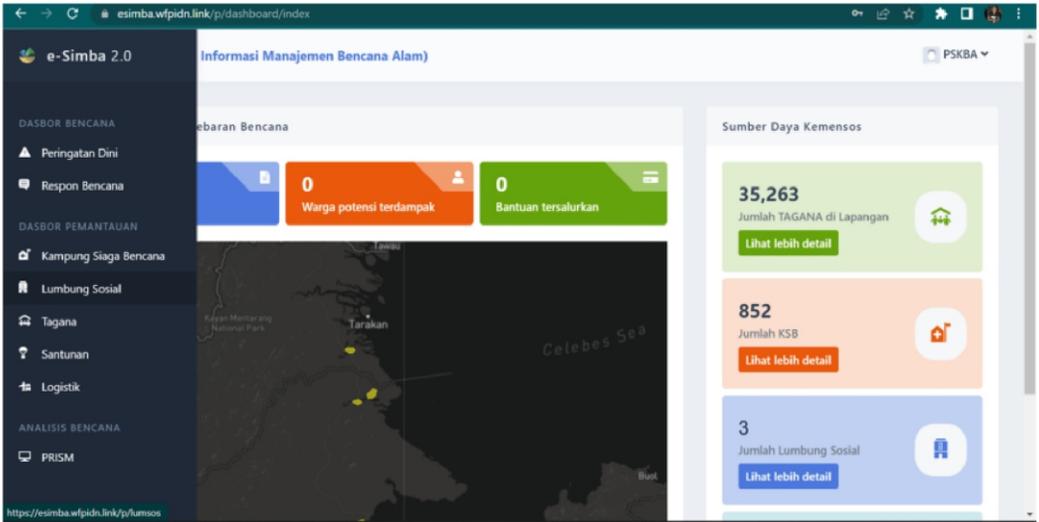


PROVINSI	KAB/KOTA	LOKASI/ALAMAT	LUMBUNG SOSIAL
1. SULAWESI UTARA	KAB. KEPULAUAN ...	Kec. Miangas	1
2. NUSA TENGGARA TL...	KAB. ROTE NDAO	Desa Landu - Kec. Rote...	1
3. JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	Kec. Arjosari Desa Man...	1



Lampiran 10. Pengenalan Implementasi Data Laporan Manual ke dalam Sistem Manajemen Logistik yang terintegrasi e-SIMBA dan Command Center

SCREENSHOOT DRAFT INTEGRASI DATA LUMBUNG SOSIAL KE DALAM E-SIMBA



Lampiran 11. Dukungan Menteri Sosial RI terhadap Program Lumbung Sosial



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER DALAM RANGKA PKN TK.II ANGKATAN XXX TAHUN 2023

Nama : Dr. (H.C.) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T
NIP : -
Jabatan : MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
No. HP : -

Sebagai pihak latens dalam proyek perubahan ini, memberikan dukungan kepada Reformer :

Nama : JOHN H. MAMPIOPER, G.DipDevPrac., M.Eng
NDH : 28
Instansi : KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Proyek Perubahan : "STRATEGI PERCEPATAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA MELALUI PEMBENTUKAN LUMBUNG SOSIAL DI 4 PROVINSI DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI TANAH PAPUA"

Disetujui Oleh,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Dr. (H.C.) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T.

Lampiran 12. Dukungan Plt. Sekretaris Jenderal Kemensos RI terhadap Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN STAKEHOLDER
DALAM RANGKA PKN TK.II ANGGARAN XXX TAHUN 2023**

Nama : ROBBEN RICO, A,Md, LLAJ, SH, ST, M.Si
NIP : 19800913 200212 1 001
Jabatan : Plt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENSOS RI
No. HP : -

Sebagai pihak latens dalam proyek perubahan ini, memberikan dukungan kepada Reformer :

Nama : JOHN H. MAMPIOPER, G.DipDevPrac., M.Eng
NDH : 28
Instansi : KEMENTERIAN SOSIAL RI
Proyek : "STRATEGI PERCEPATAN KEBUTUHAN
Perubahan : DASAR KORBAN BENCANA MELALUI
PEMBENTUKAN LUMBUNG SOSIAL
DI 4 PROVINSI DAERAH OTONOM BARU
(DOB) DI TANAH PAPUA"

Disetujui Oleh,



ROBBEN RICO, A,Md, LLAJ, SH, ST, M.Si

**Lampiran 13. Dukungan Anggota DPD RI Dapil Papua,
Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum terhadap Program Lumbung Sosial
di Tanah Papua**

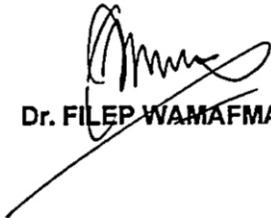
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum
Jabatan : Anggota DPD RI

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jakarta, 27 Oktober 2023


Dr. FILEP WAMAFMA, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

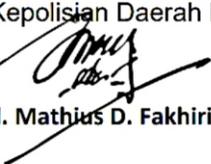
Nama : Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K

Jabatan : Kepala Kepolisian Daerah Papua

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jayapura 23 Oktober 2023

Kepala Kepolisian Daerah Papua


Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri. S.I.K

Lampiran 15. Dukungan Rektor Universitas Cenderawasih

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
Jl. Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Jayapura-Papua
Laman <http://www.unceen.ac.id>

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor: 5476UN20/LL/2023

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE, M.Sc, Agr
Jabatan : Rektor Universitas Cenderawasih

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jayapura, 26 Oktober 2023

Rektor,



Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE., M.Sc, Agr.
NIP. 19681008 199601 1 001
REKTOR

Lampiran 16. Dukungan Akademisi Universitas Papua, Prof. Charlie Heatubun

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS
Jabatan : Akademisi - Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Manokwari, 23 Oktober 2023


Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS

Lampiran 17. Dukungan Kepala Balai Besar MKG Wilayah V Papua

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : YUSTUS RUMAKIEK, S.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar MKG Wilayah V

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jayapura, 30 Oktober 2023

Kepala Balai Besar MKG Wilayah V

YUSTUS RUMAKIEK, S.Si

Lampiran 18. Dukungan Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNIPA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
MANOKWARI**
Alamat : Jln. Gunung Salju Ambon Manokwari (98314) E-mail : pusatlth@unipa2019@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Aplena E. S. Bless, M.Sc
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua Manokwari

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Manokwari, 27 Oktober 2023

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP
UNIVERSITAS PAPUA
KEPALA,**

DR. APLENA E. S. BLESS, SP., M.SC
NIP. 19810422 200604 2 001

Lampiran 19. Dukungan Pj. Gubernur Papua Barat Daya



Lampiran 20. Dukungan Uskup Keuskupan Gereja Katolik

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Mgr. Dr. Yanuarius D. Matopa Youw, Pr
Jabatan : Pimpinan Keuskupan Jayapura

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Jayapura, 25 Oktober 2023



Mgr. Dr. YANUARIUS D. MATOPA YOUW, Pr

Lampiran 21. Dukungan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : FLORENTINA BIFAL
Jabatan : STAF PSE KEUSKUPAN AGATS- ASMAT- PP SELATAN

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Agats, 14 November 2023



FLORENTINA BIFAL.....

Lampiran 22. Dukungan Dinas Sosial Kabupaten Asmat, Papua Selatan

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : DIAN IRIANTO, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Perangtulangan Kemiskinan

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Agats, 14. November 2023



DIAN IRIANTO, S.Sos.
NIP. 19660120 19712 1001

Lampiran 23. Dukungan Komandan KOREM 173/PVB Kodam XVII Cenderawasih

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Brigjen TNI Franz Yohannes Purba, S.I.P., M.M
Jabatan : Komandan Korem 173/Praja Vira Braja

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Biak, 25 Oktober 2023

Komandan Korem 173/Praja Vira Braja



Franz Yohannes Purba, S.I.P., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran 24. Dukungan Komandan Komando Distrik Militer 1705/Nabire

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Doni Firmansah, M. Han.
Jabatan : Komandan Kodim 1705/Nabire

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Nabire, 25 Oktober 2023

Komandan Kodim 1705/Nabire



Doni Firmansah, M. Han.
Letnan Kolonel (P) NRP 11030026870681

Lampiran 25. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kab. Lanny Jaya

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : GUNAI TABUNI, S.Pd., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Tiyom, 20 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lanny Jaya



GUNAI TABUNI, S.Pd., M.Si

Lampiran 26. Dukungan Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Hasuka Hisage, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pegunungan

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Wamena, 18 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Pegunungan



Hasuka Hisage, S.Pd., M.Pd

Lampiran 27. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Sumule Tumbo, SE, MM
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Wamena, 19 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN



Sumule Tumbo, SE, MM

Lampiran 28. Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Anwar Harun Damanik, S.STP., MM
Jabatan : Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Nabire, 29 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH



ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197805171998101002

Lampiran 29. Dukungan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Nenu Tabuni, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Nabire, 29 Oktober 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI PAPUA TENGAH


NENU TABUNI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 197706122006051004

Lampiran 30. Dukungan Ketua Jemaat GKI Koinonia Moenamani Kab. Dogiyai

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Pdt. Rona N. Soumokil, S.Th
Jabatan : Ketua Jemaat GKI Koinonia Moenamani Dogiyai,
Klasis Nabire, Papua Tengah

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Moenamani, 25 Oktober 2023


Pdt. RONA N. SOUMOKIL, S.Th

Lampiran 31. Dukungan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai

**DEWAN ADAT PAPUA**
WILAYAH III DOBERAY
(PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA)
Sekretariat : Jl. Pendidikan Lorong 5 Tanjung Pemail RT 003 / RW 005 Kel. Klabatu Distrik Malamsima
Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya. CP : Mobile/HP : 0812 8098 4831 / HP : 082199671130

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR : 001/DAP-WIL-III-DOB/SP-DUK/X/2023

Berkenaan dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Paul Finsen Mayor, S.IP, CM, NNLP
J a b a t a n : Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay – Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul “ *Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua* ” yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac. M.Eng. Kepala BALAI BESAR REGIONAL VI Jayapura Kementerian Sosial RI

Sorong, 25 Oktober 2023

KETUA DEWAN ADAT PAPUA
WILAYAH III DOBERAY
PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA


PAUL FINSEN MAYOR, S.IP, CM, NNLP
M A N A N W I R

Lampiran 32. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dra. Magdalena Tenau, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul “*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*” yang dilakukan oleh Reformers Sdr. John Herman Mampioer, G.DipDevPrac., M.Eng. Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Kumurkek, 08 November 2023

Kepala Dinas Sosial

Dra. Magdalena Tenau, MM
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 196608081994012001

Lampiran 33. Dukungan Pj. Bupati Maybrat

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Maybrat

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Kumurkek, 25 Oktober 2023



Pj. Bupati Maybrat

Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si

Lampiran 34. Dukungan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Martha M. Sanadi, S.Pd. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial KAbupaten Raja Ampat

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformier Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac., M.Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Waisai, 09 November 2023



Lampiran 35. Dukungan Pj. Bupati Dogiyai

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Papua Tahun 2023, saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Drs. Petrus Agapa, M.Si

Jabatan : Penjabat Bupati Dogiyai

Dengan ini menyatakan dukungan secara penuh untuk Proyek Perubahan dengan Judul "*Strategi Percepatan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Di Tanah Papua*" yang dilakukan oleh Reformer Sdr. John Herman Mampioer, G,DipDevPrac , M Eng, Kepala Balai Besar Regional VI Jayapura - Kementerian Sosial RI.

Dogiyai, November 2023

Pj. BUPATI DOGIYAI



Biodata Penulis



John Herman Mampio per, G,Dip.DevPrac., M.Eng lahir di Jayapura, 16 November 1981. Penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Papua sejak tahun 2005. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Kota Jayapura (Tahun 1987 – 1999). Lulus Program Sarjana dari Universitas Papua Manokwari tahun 2004. Penulis

juga pernah menamatkan Pendidikan Program Pasca Sarjana di UGM Yogyakarta (Tahun 2009) dan James Cook University Australia (Tahun 2018). Penulis pernah belajar Manajemen Kawasan Konservasi di US Forest Service Washington D.C dan Fakultas Kehutanan Universitas Montana, Amerika (Tahun 2014); Penulis mengikuti pelatihan Manajemen Limbah di Korea Selatan (Tahun 2015); Pelatihan Kebijakan Kehutanan Asia – Pasific di Malaysia (Tahun 2019). Jabatan struktural yang pernah dipercayakan kepada penulis antara lain sebagai Kepala Sub Bidang Manajemen Aset pada BPSDALH Provinsi Papua (Tahun 2009 – 2013); Kepala Sub Bidang Inventarisasi Sumberdaya Alam pada Kementerian Lingkungan Hidup RI (Tahun 2014 – 2015); Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Biak Numfor (Tahun 2015-2016). Penulis pernah bekerja sebagai Kepala UPTD TBTA Biak pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Tahun 2020 – 2022). Saat ini penulis menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala BBPPKS Kementerian Sosial RI Regional VI Jayapura sejak 28 Desember 2022.

Penerbit :

CV. ANGKASA PELANGI
Anggota IKAPI

Jl. Baru Youtefa - Abepura